

SKRIPSI

ANALISIS FUNGSI KEPALA DESA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN (Studi Kasus Pembangunan Fisik Desa Teluk Ketapang Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti)

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna memperoleh
Gelar Sarjana Sosial Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial



Oleh

M. RAIS
NIM. 10576002242

**JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
PEKANBARU - RIAU
2010**

ABSTRAK

ANALISIS FUNGSI KEPALA DESA DALAM MENINGKTKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN (STUDI KASUS PEMBANGUNAN FISIK DI DESA TELUK KETAPANG KECAMATAN MERBAU KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI)

**OLEH : M. RAIS
NIM : 10576002242**

Menurut Veithzal Riva'i (2004 : 148). Fungsi diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. Selanjutnya menurut Muhammad Ali (2000 : 304) fungsi adalah suatu yang menjadi bagian yang memegang pimpinan terutama dalam terjadinya suatu hal dan atau peristiwa. Fungsi tersebut mengandung arti bahwa dengan adanya posisi tertentu maka yang lebih memiliki kepentingan dalam kehidupan sosial akan lebih besar fungsi dan tanggung jawabnya dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat yang dipimpinya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Fungsi Kepala Desa dalam meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan, di Desa Teluk Ketapang Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti. Adapun yang menjadi Populasi dan Sampel dalam penelitian ini adalah : Aparat Pemerintahan Desa serta Penduduk yang ada yaitu berjumlah 1994 jiwa dan 442 KK. Analisa data setelah data atau bahan-bahan yang diperlukan baik data primer maupun data sekunder, kemudian dikelompokan sesuai dengan keperluan dan kegunaan kemudian dianalisa secara deskriptif kualitatif dengan jalan menggambarkan menerapkan, dan menguraikan secara saksama hasil temuan-temuan penelitian secara jelas dan singkat.

Penelitian ini menggunakan responden sebagai sumber informasi utama (data penelitian) yang dibutuhkan untuk menganalisis keberadaan variabel penelitian. Data yang dikumpul dari responden penelitian melalui daftar kuestioner dipergunakan sebagai acuan utama untuk menganalisis, variabel penelitian pada objek atau lembaga yang diteliti. Bertitik tolak dari penjelasan diatas maka penelitian ini adalah penelitian Diskriptif Kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat dilihat beberapa hal penting yang dilakukan oleh Kepala desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dalam hal ini kepala desa telah melakukan fungsinya semaksimal mungkin demi meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Namun didalam pelaksanaan fungsinya banyak hal yang perlu diperhatikan oleh Kepala Desa Teluk Ketapang, dalam hal ini terutama sekali yang perlu diperhatikan adalah faktor Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat itu sendiri agar lebih berkualitas didalam menghadapi perkembangan Otonomi Daerah sehingga dapat bersaing dengan dunia luar.

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Sistematika Penulisan	9
BAB II TELAAH PUSTAKA	
II.1 Kerangka Pikiran	10
a. Pengertian Fungsi	10
b. Pengertian Partisipasi	11
c. Pengertian Pembangunan	12
d. Pengertian Desa	13
e. Fungsi dan Kewajiban Kepala Desa.....	15
f. Pemerintahan Desa	20
g. Badan Permusyawaratan Desa.....	22
II.2 Definisi Konsep	24
II.3 Definisi Oprasional.....	26
II.4 Oprasional Variabel.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	
III.1 Jenis Penelitian.....	31
III.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	31
III.3 Populasi dan Sampel	32

III.4 Jenis dan Sumber Data	33
III.5 Teknik Pengumpulan Data.....	34
III.6 Hipotesis.....	35
III.7 Teknik Analisa Data.....	35
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
IV.1 Karakteristik Desa Teluk Ketapang	36
IV.2 Struktur Organisasi	42
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
V.1 Identitas Responden	46
1. Tingkat pendidikan Responden Dari Aparat Pemerintahan Desa.....	46
2. Tingkat Pendidikan Responden Berdasarkan Kepala Keluarga.....	47
3. Umur Responden.....	48
V.2 Studi Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa	49
1. Perintah Penggerakan atau Intruksi Dari Kepala Desa	49
2. Pembinaan Kehidupan Masyarakat.....	58
3. Pemberian Petunjuk	65
4. Pertemuan – Pertemuan.....	67
5. Bimbingan – Bimbingan	73
BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran	81

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar belakang Masalah

Guna mewujudkan keinginan politik sebagaimana tertuang dalam TAP MPR No XV/MPR 1998 tentang penyelenggaraan Otonomi Daerah, pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah maka lahir UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang tersebut mempertegas kembali hubungan antara kabupaten/kota dengan provinsi yang dianggap sering menciptakan ketidak sinkronan jalan pemerintahan daerah, juga UU No 32 tahun 2004 memasukkan pasal baru tentang pemilihan kepala desa secara langsung.

Dalam UU No 32 tahun 2004 ada pasal tertentu yang mengatur tentang pemerintahan desa yang merupakan struktur organisasi pemerintahan terendah dalam susunan pemerintahan nasional. dapat kita ketahui bahwa pemerintah desa selama ini tidak lagi leluasa memutuskan kewenangannya sebagaimana yang di maksud oleh penjelasan pasal 18 UUD 1945 yaitu *self governing comuniti*.

Dengan lahirnya UU No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah merupakan faktor penyebab terjadinya perubahan sosial, politik, ekonomi, budaya yang meluas baik ditingkat daerah maupun ditingkat nasional. Sehingga daerah berkesempatan untuk mengurus daerahnya sendiri.

Berdasarkan pasal 206 UU No 32 Tahun 2004 ditegaskan urusan-urusan yang menjadi kewenangan desa adalah sebagai berikut :

- a. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa.
- b. Unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa.
- c. Tugas pembantuan dari pemerintahan, pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota.
- d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada kepala desa.

Dari rincian pasal 206 UU No 32 Tahun 2004 diatas diketahui bahwa pemerintahan desa selain diberikan kewenangan untuk menjalankan tugas yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang juga menjalankn tugas berdasarkan hak asal usul desa yang oleh Talizudulu Ndraha (1991 : 78) terdiri dari :

1. Mengambil keputusan atau membuat peraturan yang mengikat segenap warga desa atau pihak tertentu.
2. Menjalankan pemerintahan desa.
3. Menggali dan menetapkan sumber-sumber keuangan sendiri.
4. Menyusun Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa (APPKD).
5. Menyelenggarakan gotong royong.
6. Menyelenggarakan peradilan desa.
7. Menyelenggrakan usaha lain demi kesejahteraan masyarakat desa.

Dari sejumlah kewenangan desa di atas terlihat bahwa desa mempunyai sejumlah kewenangan guna mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Pemerintahan desa yang mana menurut UU 32 Tahun 2004 pada pasal 202

ditegaskan bahwa yang di maksud pemerintahan desa adalah kepala desa dengan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD), kedua lembaga inilah pada hakekatnya yang menjalankan otonomi setiap desa baik dari membuat kebijakan, menjalankan sampai pada pengawasan.

Otonomi desa sebagai salah satu hak istimewa desa yang di jamin oleh UU dan Negara yang saat ini secara optimal dipergunakan oleh desa. Hal ini terdapat diberapa desa di Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti, salah satu desa yakni Desa Teluk Ketapang dengan luas wilayah ± 1200 Ha. Dari berapa sumber desa yang terdapat didesa teluk ketapang ini pada umumnya belum bisa dijalankan semuanya karena kurangnya kemampuan dari kepala desa dalam menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah.

Dibidang pembangunan khususnya dibidang peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik Desa Teluk Ketapang telah menetapkan jumlah sumber daya desa, dimana sumber daya desa tersebut merupakan kepentingan desa itu sendiri, adapun potensi yang terdapat pada desa teluk ketapang meliputi :

- a. pengembangan tanaman yang dapat dikembangkan dari beberapa jenis komoditi antara lain, komoditi nenas dan komoditi palawijaya.
- b. Pengembangan tanaman perkebunan dapat dikembangkan beberapa komoditi antara lain, komoditi kelapa, sawit, dan komoditi karet.

- c. Pengembangan usaha perikanan dapat dikembangkan antara lain, pengembangan budi daya ikan didalam kerambah dan pengembangan tambak udang

Selain itu dapat juga dilihat bahwa sumber daya manusia yang terdapat didesa teluk ketapang sampai tahun 2008 masih sangat minim yang mempunyai tingkat pendidikan sarjana, karena pada umumnya tingkat kelulusan yang terdapat didesa teluk ketapang adalah SD dan mereka pada umumnya mempunyai pekerjaan sebagai petani, buruh dan nelayan, yang selanjutnya untuk melihat SDM tersebut dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel I

Tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan Masyarakat Desa Teluk Ketapang

No	Jenis pekerjaan	Tingkat Pendidikan					jumlah
		SD	SMP	SMA	D3	SI	
1	Petani	247	129	39			415
2	Pedagang	43	40	76	9		168
3	Nelayan	186	36	24			246
4	Buruh	58	105	121			287
5	PNS		1	4		6	11
6	Honorar				15	5	20
7	Jumlah	534	311	267	24	11	1147

Sumber : Kantor Kepala Desa Teluk Ketapang 2009

Dengan melihat data tabel diatas maka diketahui SDM yang ada didesa teluk ketapang masih sangat minim yang mempunyai tingkat pendidikan yang kurang

memadai, dimana pada umumnya mereka hanya mempunyai tingkat kelulusan SD sederajat, maka dengan sendirinya berbagai cara untuk meningkatkan pembangunan didesa tersebut sangat sulit dilakukan.

Selanjutnya dalam penelitian ini potensi yang akan dilihat adalah fungsi kepala desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, yaitu dengan diikut sertakan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan yang akan dilaksanakan, terutama pembangunan yang bersifat fisik seperti pembangunan tempat ibadah, sarana olah raga dan lain sebagainya.

Tabel I.2
Data Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Teluk Ketapang Kecamatan
Merbau Kabupaten kepulauan Meranti
2007 - 2008

No	Pelaksanaan Pembangunan	Target	Waktu
	Tahun 2007		
1	Rehap Total SDN 09	Terealisasi	15 Mar – 15 Agus
2	Pembangunan Jalan Baru Dusun	Terealisasi (1000 M)	15 Apr – 15 Agus
3	Rehap Masjid At-Taqwa	Terealisasi	20 Agus – 20 Nov
	Tahun 2008		
1	Pembangunan Jalan Sudirman	Terealisasi (1000 M)	20 Agus – 20 Des
2	Semenisasi Kantor Kepala Desa	Terealisasi	15 Sep – 15 Des
3	Semenisasi Jembatan Dusun III	Terealisasi (25 M)	20 Agus – 20 Des
4	Pem Prasarana dan Sarana Pemukiman	Belum Terealisasi	-

Sumber : Kantor Desa Teluk Ketapang, 2009

Berdasarkan pada tabel 1.2 diatas, dapat diketahui bahwa pelaksanaan pembangunan terutama pembangunan fisik dapat terlihat pada dua tahun belakangan yaitu yaitu pada Tahun 2007 terdapat 3 pelaksanaan pembangunan, dan 4 pembangunan fisik pada tahun 2008.

Berdasarkan data yang diperoleh, dapat diungkapkan bahwa terlihat adanya gejala yang mendukung untuk diadakannya penelitian yang berhubungan dengan pergerakan yang dilakukan oleh kepala desa terhadap sumber daya manusia di desa teluk ketapang. diantaranya yaitu membina kehidupan masyarakat yang semestinya dibimbing oleh kepala desa guna menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan tidak ada dilakukan, sehingga masyarakat banyak yang tidak mengetahui mengenai kebijakan dari kepala desa tersebut. Serta untuk apa kebijakan tersebut dilakukan oleh kepala desa. Sehubungan dengan itu penulis tertarik untuk meneliti tentang peranan pemerinthan desa dalam menggerakkan masyarakat dengan judul : **Analisis Fungsi Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan (Studi Kasus Pembangunan Fisik Di Desa Teluk Ketapang Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti).**

I.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas dengan mengkhhususkan pada pergerakan masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam pembangunan fisik desa di Teluk Ketapang Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti. Dapat di ketahui bahwa pergerakan yang dilakukan oleh kepala desa masih sangat kurang sehingga terdapat tindakan acuh tidak acuh atau tidak ingin tahumasyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan yang di lakukan sesuai dengan gejala yang ada maka dalam penelitian ini penulis dapat menetapkan permasalahannya :

“ Bagaimana Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan (Studi Kasus Pembangunan Fisik Di Desa Teluk Ketapang Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti)”.

I.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitaian

penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Untuk mengetahui Pelaksanaan fungsi kepala desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
- b. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan fungsi kepala desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Teluk Ketapang Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti.

2. Kegunan penelitian ini untuk :

- a. Sebagai bahan masukan bagi lembaga yang berwenang dalam menggerakkan sumber daya desa dalam pembangunan.
- b. Bahan kajian pemerintahan di desa teluk ketapang khususnya, dan pemerintah Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti umunya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
- c. Data primer bagi peneliti berikutnya hanya bermaksud untuk melakukan studi lebih mendasar tentang menggerakkan partisipasi masyarakat yang dilakukan pemerintahn desa

- d. Memperkaya dokumentasi ilmiah khususnya di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Jurusan Administrasi Negara Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau tentang pemerintahan desa khususnya di Riau.

I.4. Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan

Pada Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Telaah Pustaka

Pada Bab ini mengemukakan berbagai masalah yang berhubungan dengan penelitian yang terdiri dari Kerangka Teori, Definisi Konsep, dan Defenisi Operasional.

Bab III : Metode Penelitian

Pada Bab ini berisikan bentuk penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, hipotesis dan teknik analisa data.

Bab IV : Gambaran umum lokasi penelitian

Pada Bab ini akan dibahas tentang gambaran umum desa lokasi penelitian yang meliputi kondisi geografis, demografi dan struktur organisasi

Bab V : Hasil penelitian dan pembahasan

Pada Bab ini akan memuat hasil penelitian dan pembahasan tentang Analisis Fungsi Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan.(Studi Kasus Pembangunan fisik Di

Desa Teluk Ketapang Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan
Meranti)

Bab VI : Kesimpulan dan Saran

Di dalam Bab ini akan disajikan kesimpulan dan saran dari berbagai
pembahasan.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

II.1. Kerangka Pikiran

Pada suatu proses penelitian ilmiah sebagai usaha untuk memperdalam suatu permasalahan maka fungsi kerangka teori sangat membantu dalam menentukan tujuan dan arah penelitian dalam memilih konsep-konsep yang tepat. Dengan demikian dalam pemecahan masalah akan tampak lebih jelas sesuai dengan teori itu sendiri. Maka penulis beranjak dalam melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan kondisi organisasi dimana lembaga itu berada dari adanya teori-teori yang tepat yang dapat mendukung dalam upaya pemecahan masalah dalam penelitian penulis.

a. Pengertian Fungsi

Menurut Soerjono Soekanto (1990 : 268). Fungsi meliputi norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang dalam masyarakat sebagai rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan sosial. Maksudnya adalah posisi-posisi yang dimiliki seseorang tersebut seperti kepala desa, dengan posisi tersebut pemerintahan desa akan lebih memiliki wewenang untuk menegakan peraturan-peraturan dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Soerjono Soekanto (2005 : 243). Fungsi adalah pertama, merupakan aspek dinamis kedudukan apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya dia menjalankan suatu peranan.

Menurut Veithzal Riva'I (2004 : 148). Fungsi diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. Selanjutnya menurut Muhammad Ali (2000 : 304) fungsi adalah suatu yang menjadi bagian yang memegang pimpinan terutama dalam terjadinya suatu hal dan atau peristiwa. Fungsi tersebut mengandung arti bahwa dengan adanya posisi tertentu maka yang lebih memiliki kepentingan dalam kehidupan sosial akan lebih besar fungsi dan tanggung jawabnya dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat yang dipimpinnya.

b. Pengertian Partisipasi

partisipasi memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintah desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat, agar masyarakat memiliki dan turut bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai warga desa.

Partisipasi menurut Hernandes (dalam Yusran, 2007 : 11) adalah suatu hal yang sangat penting dalam pemerintahan demokratis, terutamanya dalam praktek pemerintahan daerah.

Wibowo (2004 : 55) mengemukakan bahwa partisipasi adalah keikutsertaan secara aktif setiap warga Negara atau kelompok masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, perumusan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pembinaan masyarakat.

Sementara itu Ndraha (2006 : 103) mengemukakan bahwa ada enam fase dalam partisipasi, antara lain :

- a. Partisipasi dalam menerima dan memberikan informasi.
- b. Partisipasi dalam memberikan tanggapan.
- c. Partisipasi dalam perencanaan.
- d. Partisipasi dalam melaksanakan pembangunan.
- e. Partisipasi dalam menerima kembali hasil-hasil pembangunan.
- f. Partisipasi dalam menilai hasil-hasil pembangunan.

c. Pengertian Pembangunan

Pembangunan dapat diartikan suatu konsep perubahan sosial yang berlangsung terus menerus menuju kearah perkembangan dan kemajuan dan memerlukan masukan-masukan yang menyeluruh dan berkesinambungan dan merupakan usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk mencapai tujua negara (Haryono Sudiramunawar, 2002 :15)

Pembangunan adalah diartikan suatu usaha atau usaha pertumbuhan dan perubahan berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintahan menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. (Sondang P Siagian : 2005)

Dari uraian diatas maka dapat dilihat bahwa pembnagunan adalah hasil dari kegiatan dan program yang dibuat oleh pemerintah yang diperuntukan bagi masyarakat untuk menunjang pencapaian kesejahteraan sosial, tujuan ekonomi sosia, demografi politik dan sebagainya dengan cara meningkatkan pembangunan. Sedangkan pelaksanaan yaitu sebagai cara atau strategi yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Sedangkan tujuan utama dari pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Beragam usaha dari berbagai sector terus dikembangkan dalam usaha pencapaian tujuan tersebut. Namun demikian, seringkali terjadi bahwa usaha dan niat baik tersebut tidak mencapai seluruh masyarakat terutama masyarakat di pedesaan. Disamping itu banyak terjadi kerusakan lingkungan karna pendayagunaan yang berlebihan dalam mengejar taegen pmbangunan tertentu dan juga terjadi pelanggaran norma-norma kehidupan masyarakat pedesaan.

d. Pengertian Desa

Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

Pakar sejarah memandang desa sebagai sumber kekuatan dan ketahanan dasar dalam mempertahankan kemerdekaan *community power*. Menurut Muhadan Labowo (2006 : 133) Desa dianggap sebagai sumber nilai luhur yang memiliki karakteristik seperti gotong royong, musyawarah mufakat dan kekeluargaan sehingga menimbulkan berbagai semboyan.

Dapat dipahami bahwa Desa merupakan basis sosial ekonomi dan budaya serta landasan pembangunan Nasional dalam era menuju kehidupan Masyarakat yang adil dan makmur. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, merupakan cita-cita nasional bangsa indonesia

Desa sebagai organisasi dalam dinamika kegiatan pembangunan tidak bisa luput dari menggunakan metode organisasi, administrasi dan manajemen sesuai dengan defenisi organisasi yang merupakan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang dilakukan secara rasional untuk mencapai tujuan bersama.

Untuk lebih lanjutnya (Sugiyono , 2004 : 7) menyatakan pembangunan Desa adalah seluruh usaha-usaha yang dilakukan dalam lingkungan Desa dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup Masyarakat Desa serta meningkatkan kesejahteraan Desa.

Pembangunan Desa harus dilaksanakan secara terarah, dinamis dan berkelanjutan dalam arti bahwa pembangunan Desa akan terus dilaksanakan dengan memperhatikan situasi dan kondisi serta kemampuan yang dimiliki oleh Desa yang bersangkutan, terutama yang menyangkut potensi manusianya dan daya dukung alaminya.

Studi yang terkandung dalam setiap sendi kehidupan Masyarakat Desa adalah adanya perubahan dan pertumbuhan atau perkembangan yang terjadi secara terus menerus tanpa akhir. Usaha manusia yang dituangkan dalam bentuk kegiatan secara terus menerus agar terjadi perubahan, pertumbuhan dan perkembangan sesuai dengan yang dikehendaki pada umumnya disebut dengan pembangunan.

e. Fungsi Dan Kewajiban Kepala Desa

Pelayanan yang dilakukan oleh seorang Pemimpin adalah komitmen organisasional birokrasi. Pemerintah harus berada dipihak masyarakat, melayani berarti membantu menyiapkan atau mengurus apa yang dibutuhkan masyarakat

dalam meningkatkan kesejahteraan yang dalam hal ini menyiapkan dan mengurusnya sebaik mungkin. (Alwis. 2000:36)

Salah satu fungsi seorang pemimpin yang juga penting adalah fungsi menggerakkan, yang mana menggerakkan dapat diartikan sebagai tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok siap berusaha untuk mencapai saran-saran agar dengan perencanaan dapat berjalan dengan baik (Miftah Thoha, 2005:12).

I. Nyoman Bratha (1983:85) mengatakan bahwa alat yang lazim digunakan untuk mengerakan kelompok antara lain adalah:

- a. Perintah-perintah
- b. Petunjuk-petunjuk
- c. Bimbingan
- d. Surat edaran
- e. Rapat koordinasi
- f. Pertemuan-pertemuan

Kelangsungan suatu organisasi dalam usaha mencapai tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan, tidak terlepas dari adanya peran dari segenap anggota organisasi yang mampu melaksanakan tugasnya, sehingga dapat dikatakan bahwa anggota organisasi merupakan salah satu sumber daya manusia yang mendukung kelangsungan suatu organisasi

Dapat dikatakan bahwa untuk tercapainya keterpaduan dan kerjasama yang baik antara Pemerintah Desa dengan Masyarakat, maka sudah seharusnya

inisiatif usaha hendaknya datang atau muncul terlebih dahulu dari Pemerintah Desa dengan menjalankan tugas-tugas yang harus dijalankan.

Secara faktual, pada perkembangannya bentuk sebagian besar desa di Indonesia pada hakekatnya sampai sekarang masih tetap menjalankan kesatuan masyarakat hukum asli, dengan berlandaskan pada aturan hukum adat. Oleh karenanya pemerintah desa yang lahir dari system hukum yang berlaku bersifat Demokratis sesuai dengan Filosofi terbentuknya desa dan diharapkan pemerintah desa dapat menjalanka sekurang-kurangnya tiga peran utamanya yaitu, *Sebagai Struktur Prantara, Sebagai Pelayan Masyarakat, dan Sebagai Agen Pembaharuan* (Sadu Wasistomo, 2006:69)

2. Fungsi dan Tugas Kepala Desa

Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 2001 tentang pedoman Umum pengaturan mengenai Desa, Pasal 16 dikatakan bahwa tugas dan kewajiban Kepala Desa adalah :

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa
2. Membina kehidupan Masyarakat Desa
3. Membina Perekonomian Desa
4. Memelihara ketentraman dan ketertiban Desa
5. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa
6. Mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 pasal 14 tentang desa menjelaskan tugas, fungsi, kewajiban dan hak kepala desa adalah :

1. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
2. Dalam melaksanakan tugas yang dimaksud pada ayat 1 Kepala Desa mempunyai wewenang sebagai berikut :
 - a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan bersama BPD.
 - b. Mengajukan rancangan peraturan desa
 - c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD
 - d. Menyusun dan mengajukan rancangan desa mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan Desa (APBDes) untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
 - e. Membina kehidupan masyarakat desa.
 - f. Membina perekonomian desa.
 - g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
 - h. Mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat mengajukan kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
 - i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

2. Kepala Desa mempunyai kewajiban

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara kesatuan republik Indonesia.
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- c. Memelihara kesatuan dan ketertiban masyarakat.
- d. Melaksanakan kehidupan demokrasi
- e. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.
- f. Menjalin hubungan dengan seluruh mitra kerja Pemerintahan Desa.
- g. Mentaati dan menegakkan seluruh Peraturan Perundang-Undangan.
- h. Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa dengan baik.
- i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa.
- j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa.
- k. Mendamaikan perselisihan masyarakat didesa.
- l. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa.
- m. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat.
- n. Memperdayakan masyarakat dan kelembagaan didesa dan
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

3. Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati/wali kota, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban BPD, serta menginformasikan laporan pertanggungjawaban Pemerintahan Desa kepada masyarakat.
4. Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat 1 kali dalam satu tahun.
5. Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD disampaikan satu kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD.
6. Menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa kepada masyarakat dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau media lainnya.
7. Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa digunakan oleh Bupati/Walikota sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.
8. Laporan masa jabatan kepala desa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat dan kepada BPD.

Dari uraian fungsi dan kewajiban tersebut jelas betapa besarnya peranan dan tanggung jawab yang harus dijalankan oleh Kepala Desa sebagai kepala pemerintahan dan pembangunan Desa.

f. Pemerintahan Desa

Menurut pasal 202 Undang-Undang No.32 Tahun 2004 dijelaskan bahwa Pemerintah desa terdiri dari;

1. Kepala desa dan perangkat desa
2. Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya
3. Sekretaris desa atau pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.

Menurut Undang-Undang No.32 Tahun 2004, Pasal 208 adapun tugas dan kewajiban Kepala Desa, dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah

Menurut Talizudulu Ndraha (1991:76) tugas Pemerintahan Desa tersebut adalah :

1. Membina ketentraman dan ketertiban diwilayahnya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh pemerintah.
2. Melaksanakan segala usaha dan kegiatan dibidang penghayatan dan pengamalan Pancasila, pembinaan Politik dalam Negeri dan pembinaan kesatuan Bangsa yang sesuai dengan garis kebijaksanaan pemerintah
3. Memimpin pemerintahan Desa dan melaksanakan segala tugas yang dibebankan oleh pemerintah yang lebih atas
4. Penyelenggarakan koordinasi terhadap segala usaha dan kegiatan masyarakat baik dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan pembangunan, untuk menciptakan daya guna dan hasil guna sebesar-besarnya.
5. Membimbing dan mengawasi segala usaha dan kegiatan masyarakat dan atau organisasi-organisasi serta lembaga kemasyarakatan.
6. Mengusahakan terus menerus agar segala peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah ditaati oleh penduduk desanya.

Pemerintah Desa merupakan simbol formil kesatuan masyarakat Desa sebagai kesatuan penduduk, pemerintah Desa memiliki wewenang untuk mengatur rumah tangganya sendiri (wewenang otonomi / pemerintah sendiri) serta wewenang dan kesatuan sebagai pelimpahan serta bertahap dari pemerintah diatas. desa merupakan tempat segala urusan dari segenap unsur pemerintah yang ada diatasnya, maka seorang kepala desa berkewajiban menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul dalam masyarakat serta harus memimpin dalam usaha pengembangan desanya disamping harus menghadapi arus dan tuntutan pengembangan kehidupan masyarakat secara menyeluruh.

Selain itu kepala desa diharapkan mampu mengkoordinir berbagai kegiatan yang diadakan baik kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat maupun yang dilakukan oleh instansi-instansi yang ada didesa.

g. Badan Permusyawaratan Desa

Hadirnya BPD memberikan suasana baru yang lebih kondusif dalam penegakan demokrasi di desa, BPD diharapkan menjadi wadah atau gelanggang politik baru bagi warga desa dalam membangun tradisi demokrasi, sekalipun tempat pembuatan kebijakan politik desa serta menjadi alat kontrol terhadap proses penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan ditingkat desa.

Sesuai dengan ketentuan peraturan daerah No. 5 Tahun 2000 tentang BPD maka dikatakan Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa.

Kehadiran BPD diharapkan mampu memberikan pemberdayaan dan pencerdasan kepada masyarakat desa untuk membangun kemandirian, kreatifitas, mengatur rumah tangga sendiri dan membuka ruang bagi masyarakat desa turut serta dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di level desanya masing-masing (Zulfan Heri, 2003: 5).

Pembentukan BPD hendaknya menjadi aset pengembangan demokrasi di masyarakat desa dari pada sebuah konflik yang mendatangkan prahara yang tak kunjung reda. (Khairul Anwar, 2003 : 5-6)

Antara partisipasi masyarakat dengan kemampuan masyarakat desa yang bersangkutan untuk berkembang secara mandiri, terdapat kaitan yang erat sekali kesediaan masyarakat untuk berpartisipasi. Hal ini merupakan tanda adanya kemampuan awal masyarakat itu untuk berkembang secara mandiri.

Partisipasi masyarakat dan kemampuan masyarakat untuk berkembang secara mandiri (swadaya) dapat ditumbuhkan melalui partisipasi masyarakat dengan pemerintah desa dimana semangat adalah suatu sikap dari keputusan kegiatan untuk melanjutkan dan kemampuan untuk menuntut cita-cita dari kelompok atau organisasi. jelaslah kiranya bahwa peran pemerintah desa pertama adalah timbulnya kesatuan gerak dan kerjasama yang baik antara sesama aparat serta dalam suatu organisasi pemerintah desa. Usaha ini merupakan tanggung jawab pemimpin formal desa yaitu kepala desa dan ia harus memahami bahwa pentingnya kedudukan setiap anggota didalam suatu organisasi.

Selanjutnya dapat dikatakan bahwa partisipasi itu hendaknya dilakukan: (Talizudulu Ndraha : 1991 : 104)

1. Disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang ada
2. Dijadikan stimulasi terhadap masyarakat yang berfungsi membangkitkan / menimbulkan dorongan jawaban yang dikehendaki
3. Dijadikan motivasi terhadap masyarakat, yang berfungsi membangkitkan tingkah laku (behavior) yang dikehendaki secara berlanjut, misalnya partisipasi horizontal.

Dengan melihat dari fungsi dan kewenangan kepala desa yang harus dijalankan, maka salah satunya terdapat fungsi menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Oleh sebab itu seorang kepala desa dalam menggerakkan bawahannya maupun masyarakatnya dalam melaksanakan kegiatan pembangunan desa sangat dibutuhkan perintah, petunjuk, bimbingan, surat edaran, rapat koordinasi, dan melakukan pertemuan-pertemuan sehingga saran-saran yang telah digariskan dapat dicapai dengan baik.

II.2. Defenisi Konsep

Menurut Masri Singaribun (2006 : 34) Konsep adalah abstraksi mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlah karakteristik kejadian, keadaan, kelompok atau individu tertentu.

Guna memudahkan penganalisaan Dalam penelitian ini serta untuk menghindari kesimpang siuran dalam menerapkan konsep, maka penulis merasa perlu untuk membatasi beberapa konsep, yang dioprasikan yaitu Penggerakan yang berarti:

Sebagai tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok setia berusaha untuk mencapai sasaran-sasaran yang sesuai dengan perencanaan yang telah ditentukan sebelumnya, adapun keriterianya adalah :

- a. Fungsi penggerakan oleh kepala desa, merupakan suatu intruksi atau ajaran oleh kepala desa agar masyarakat ikut aktif dalam kegiatan pembangunan guna mempercepat program pembangunan fisik desa tahun 2009
- b. Pembinaan kehidupan masyarakat, adalah suatu pemberian pengertian atau pengarahan oleh kepala desa agar masyarakat lebih aktif dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan
- c. Pembinaan perekonomian, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh kepala desa dalam menetapkan pendapatan desa dan mengalokasikannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, dalam hal ini memberikan bimbingan serta petunjuk yang ada mengenai pelaksanaan pembangunan
- d. bimbingan, yaitu control oleh kepala desa dengan masyarakat dalam melaksanakan pekerjaan yang telah dikerjakan dan akan dikerjakan, maknanya yaitu adanya kerja sama antara kepala desa dengan BPD serta masyarakat dalam membahas pelaksanaan pembangunan
- e. Pertemuan-pertemuan, yaitu pertemuan yang diadakan oleh kepala desa dengan masyarakat untuk membahas masalah pembangunan desa.

II.3. Defenisi Operasional

Operasional adalah unsur-unsur yang memberikan bagaimana cara mengukur suatu variabel sehingga dengan pengukuran tersebut dapat diketahui indikator-indikatr apa saja sebagai pendukung untuk dianalisis dari variabel tersebut.(Masri singaribun, 2006 :46).

Guna melakukan penganalisaan data dalam penelitian, maka kiranya perlu penulis melakukan pengukuran untuk masing-masing indikator, adapun indikator-indikator untuk mendukung pariabel dalam penelitian ini adalah fungsi kepala desa yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi penggerakan kepala desa, dapat dikatakan:

Baik : Apabila seluruh indikator yang terdiri dari perintah-perintah, petunjuk-petunjuk, bimbingan, surat edaran, rapat koordinasi, pertemuan-pertemuan dapat dijalankan, atau jawaban dari table rekapitulasi berisikan antara 67 % -100 %

Cukup Baik : Apabila sebagian atau 3-5 indikator yang terdiri dari perintah-perintah, petunjuk-petunjuk, bimbigan, surat edaran, rapat koordinasi, pertemuan-pertemuan dapat dijalankan semuanya, atau jawaban dari table rekapitulasi berisikan antara 34 % - 66 %

Kurang baik : Apabila tidak ada atau 1-2 indikator yang terdiri dari perinttah-perintah, petunjuk-petunjuk, bimbingan, surat edaran, rapat koordinasi, pertemuan-pertemuan dapat

dijalankan semuanya, atau jawaban dari table rekapitulasi berisikan antara 0 %-33 %

2. Pembinaan kehidupan Masyarakat oleh Kepala Desa dapat dikatakan

Baik : Bila pemberian pengertian atau pengarahan oleh kepala desa agar masyarakat memahami arti pentingnya pembangunan didesa dan bersedia ikut aktif didalamnya telah dimengerti oleh masyarakat

Cukup baik : Bila pemberian pengertian atau pengarahan oleh kepala desa agar masyarakat memahami arti pentingnya pembangunan didesa dan bersedia ikut aktif didalamnya kurang dimengerti oleh masyarakat

Kurang Baik : Bila pemberian pengertian atau pengarahan oleh kepala desa agar masyarakat memahami arti pentingnya pembangunan didesa dan bersedia ikut aktif didalamnya tidak dimengerti oleh masyarakat

3. Membina perekonomian Desa dikatakan :

Baik : Apabila instruksi atau anjuran oleh kepala desa dapat diikuti oleh masyarakat secara aktif dalam kegiatan pembangunan desa telah diikuti dengan baik oleh masyarakat.

Cukup baik : Apabila instruksi atau anjuran oleh kepala desa agar masyarakat ikut aktif dalam kegiatan pembangunan desa kurang diikuti dengan baik oleh masyarakat

Kurang Baik : Apabila instruksi atau anjuran oleh kepala desa agar Masyarakat ikut aktif dalam kegiatan pembangunan desa tidak diikuti dengan baik oleh masyarakat

4. pertemuan-pertemuan dikatakan :

Baik : Bila pertemuan yang diadakan oleh kepala desa dengan masyarakat untuk membahas masalah pembangunan desa telah dimengerti oleh masyarakat

Cukup Baik : Bila pertemuan yang diadakan oleh kepala desa dengan masyarakat untuk membahas masalah pembangunan desa kurang dimengerti oleh masyarakat

Kurang Baik : Bila pertemuan yang diadakan oleh kepala desa dengan masyarakat untuk membahas masalah pembangunan desa tidak dimengerti oleh masyarakat

5. Bimbingan oleh kepala desa dikatakan :

Baik : Bila kegiatan yang dilakukan oleh kepala desa dengan jalan langsung turun kelapangan bersama-sama masyarakat atau selalu berdampingan dengan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan telah dimengerti oleh masyarakat

Cukup Baik : Bila kegiatan yang dilakukan oleh kepala desa dengan jalan langsung turun kelapangan bersama-sama masyarakat atau selalu berdampingan dengan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan kurang dimengerti oleh masyarakat

Kurang Baik : Bila kegiatan yang dilakukan oleh kepala desa dengan jalan langsung turun kelapangan bersama-sama masyarakat atau selalu berdampingan dengan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan tidak dimengerti oleh masyarakat.

II.4. Operasional variabel

Selanjutnya dibawah ini dapat dilihat operasional variabel yang dinilai untuk mengukur penelitian yang dapat dilihat dibawah ini:

1. Faktor-faktor penggerakan oleh kepala desa indikatornya adalah sebagai berikut:
 - a. bentuk-bentuk penggerakan
 - b. dasar-dasar penggerakan
 - c. hambatan / kesanggupan
3. Pembinaan oleh kepala desa indikatornya adalah sebagai berikut:
 - a. Ada / tidak
 - b. Bentuk

3. Pertemuan – pertemuan indikatornya adalah:

- a. bentuk bentuk pertemuan
- b. waktu
- c. hambatan

4. Petunjuk-Petunjuk

- a. Petunjuk dari Kepala Desa

6. Bimbingan oleh Kepala Desa

- a. Peran aktif Kepala desa dalam membimbing masyarakat untuk
Pembangunan

BAB III

METODE PENELITIAN

III.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan responden sebagai sumber informasi utama (data penelitian) yang dibutuhkan untuk menganalisis keberadaan variabel penelitian. Data yang dikumpul dari responden penelitian melalui daftar kuestioner dipergunakan sebagai acuan utama untuk menganalisis, variabel penelitian pada objek atau lembaga yang diteliti. Bertitik tolak dari penjelasan diatas maka penelitian ini adalah penelitian Diskriptif Kualitatif.

Penelitian Diskriptif Kualitatif bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi keadaan saat ini dan kaitanya dengan variabel-variabel yang ada dalam penelitian ini.

III.2. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di desa teluk ketapang Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti Propinsi Riau. waktu penelitian dilakukan pada bulan Agustus 2009.

III.3. Populasi Dan Sampel

Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulanya. (Sugiono, 2004 : 90)

Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, maka peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya keterbatasan dana maka peneliti dapat menggunakan sample yang diambil dari populasi itu apa yang dipelajari untuk itu sample sample yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif mewakili. (Sugiono, 2005:91)

Adapun yang menjadi populasi dan sampel pada penelitian ini adalah aparat pemerintahan desa serta penduduk yang ada di desa Teluk Ketapang yang berjumlah sebanyak 3.738 jiwa dengan jumlah KK sebanyak 728 KK.

Untuk lebih jelasnya pengambilan sampel dari anggota populasi dapat dilihat pada table berikut :

Table III.1.
Penetapan populasi dan sampel penelitian

No	Responden	Populasi (orang)	Sampel (orang)	Persentase (%)
1	Kepala Desa	1	1	100%
2	Sekretaris Desa	1	1	100%
3	LPM	12	3	25%
4	RW	8	2	25%
5	RT	25	4	16%
6	Masyarakat	442KK	79KK	10%
	Jumlah	1994	90	-

Sumber : Kantor Kepala Desa Teluk Ketapang 2009

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah populasi sangat banyak dan homogen, dan jumlah sampel yang akan diambil juga relative banyak, untuk itu jika syarat populasi homogen maka peneliti dapat menggunakan teknik penarikan sampel acak "*Random Sampling*".(Bambang Prasetyo, 2005:128).

III.4. Jenis Dan Sumber Data

1. Data Primer

Sumber data yang diperoleh dari penyebaran (quesioner) kepada responden berupa data tentang fungsi pergerakan sumber-sumber daya desa dalam menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa yang terdiri dari

- a. Penggerakan Oleh Kepala Desa
- b. Pembinaan kehidupan Masyarakat
- c. Membina Perekonomian Desa
- d. Petunjuk dari kepala desa
- e. Bimbingan
- f. Pertemuan-Pertemuan

2. Data Skunder

Sumber adalah buku-buku literatur yang ada hubungannya dengan penelitian ini seperti Instansi Pemerintah yaitu Kantor Camat dan kantor kepala desa

Data yang dicari :

- a. Data tentang lokasi penelitian
- b. Data tentang penduduk

III.5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan, maka teknik yang dipakai adalah sebagai berikut :

a. Wawancara

Yaitu melakukan wawancara yang dimulai terlebih dahulu dengan membuat daftar pertanyaan untuk diajukan kepada responden.

b. kuesioner

Dalam hal ini penulis menggunakan daftar Kuesioner untuk memperoleh data mengenai peran pemerintah desa dalam menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.....

c. Observasi

Yaitu melakukan peninjauan secara langsung serta mencatat secara sistematis terhadap gejala yang terdapat pada objek penelitian.

III.6. Hipotesis

Hipotesis adalah prinsip yang logis dan diterima secara rasional tanpa mempercayainya sebagai kebenaran sebelum diuji kebenarannya Berdasarkan uraian latar belakang serta kerangka teori diatas maka penulis mencoba merumuskan suatu hipotesis sebagai berikut:

“Diduga Fungsi Kepala Desa Telah Maksimal Dalam Meningkatkan Pelayanan Masyarakat Dalam Pembangunan”

III.7. Teknik Analisa Data

dalam penelitian ini diperlukan data primer maupun data skunder yang kemudian dapat diperoleh melalui penelitian Deskriptif Kualitatif artinya teknik ini berusaha menyimpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian serta

berusaha menjelaskan dan menggambarkan variabel penelitian secara mendalam dan konperhensif sesuai dengan tujuan yang sudah dirumuskan

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

IV.1. Karakteristik Desa Teluk Ketapang

1. Keadaan Geografis Dan Demografis

Desa Teluk Ketapang merupakan salah satu Desa dari 16 Desa yang terdapat di Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti, yang mempunyai luas wilayah ± 1.328 Ha.

Dilihat dari keadaan Geografisnya batas wilayah Desa Teluk Ketapang Kecamatan Merbau itu sendiri adalah :

- Sebelah barat berbatasan dengan Laut
- Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Mekun
- Sebelah timur berbatasan dengan Desa Mempalai
- Sebelah utara berbatasan dengan Laut

2. Keadaan Penduduk

a. Jumlah Penduduk dan Penyebarannya

Berdasarkan sensus penduduk 2008 jumlah penduduk Desa Teluk Ketapang Kecamatan Merbau berjumlah 1994 jiwa dan 442 KK

Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah penduduk ini dapat dilihat berdasarkan tabel berikut :

tabel IV.1
Jumlah penduduk berdasarkan Dusun yang ada di desa teluk ketang

No	Dusun	Jenis Kelamin		KK
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Dusun I	311	327	134
2	Dusun II	352	410	170
3	Dusun III	337	257	138
Jumlah		1000	994	442

Sumber : *Desa Teluk Ketapang 2009*

Penduduk Kecamatan Merbau terdiri dari bermacam-macam suku antara lain :

Melayu, Jawa, Teonghoa, selanjutnya Suku Melayu adalah merupakan mayoritas penduduk desa teluk ketapang.

b. Tingkat Pertumbuhan Penduduk

Rata-rata pertumbuhan penduduk berdasarkan hasil sensus penduduk 2007 adalah 2,29% pertahun. Dan begitu juga berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2008 adalah 4,97% pertahunya, maka laju pertumbuhan penduduk meningkat disebabkan banyaknya warga dari daerah lain ke Desa Teluk Ketapang yang merupakan daerah pemukiman baru yang dekat dengan pusat perekonomian.

c. Mata Pencaharian Penduduk

Pada umumnya penduduk yang tinggal di Desa Teluk Ketapang sumber mata pencahariannya adalah buruh dan juga petani, sedangkan mata pencaharian yang lainnya adalah PNS, nelayan, tukang, pedagang. untuk lebuah jelasnya dapat kita lihat pada tabel berikut :

Tabel IV.2
Sumber mata pencaharian penduduk Desa Teluk Ketapang

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1	Buruh	287	25,02%
2	Petani	415	36,18%
3	Nelayan	246	21,44%
4	Pedagang	168	14,64%
5	PNS	11	1,00%
6	Honorar	20	1,74%
Jumlah		1147	100%

Sumber: Monografi desa teluk ketapang 2009

Dari tabel IV.II. tersebut dapat kita lihat dengan jelas, bahwa penduduk Desa Teluk Ketapang lebih banyak bekerja sebagai petani yaitu 415 jiwa atau 36,18%, pekerja buruh sebanyak 287 jiwa atau 25,02%, pekerja sebagai nelayan sebanyak 246 jiwa atau 21,44%, pekerja sebagai pedagang sebanyak 168 jiwa atau 14,64 % dan bekerja sebagai tenaga honorar sebanyak 20 jiwa atau 1,74%, dan PNS sebanyak 11 jiwa atau 1,00%.

Jadi sangat jelas bahwa mata pencaharian atau jenis pekerjaan penduduk yang paling banyak di Desa Teluk Ketapang adalah petani yaitu 415 jiwa atau 36,18%.

d. pendidikan

Kehidupan masyarakat Teluk Ketapang tidak Terlepas dari peran Pendidikan baik itu pendidikan agama maupun pendidikan umum. Pendidikan berfungsi sebagai pengembangan kemampuan dan meningkatkan taraf hidup dan

martabat manusia. Selain itu pendidikan merupakan sarana penunjang keberhasilan didalam proses belajar mengajar.

Pada tahun 2008 dalam daerah desa teluk ketapang Kecamatan Merbau terdapat 3 buah Sekolah Dasar, 1 buah sekolah lanjutan tingkat pertama. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel IV.3. dibawah ini :

Tabel IV.3
Klasifikasi sarana Pendidikan di Desa Teluk Ketapang

No	Sarana Pendidikan	Jumlah Sekolah	Tahun
1	Sekolah Dasar	3	2009
2	SLTP	1	2009
3	MDA	1	2009
jumlah		5	-

Sumber : Monografi Desa Teluk Ketang, 2009

Dari tabel IV.3 diatas menunjukkan bahwa sekolah-sekolah yang ada di desa teluk ketapang belum memadai. ini terbukti bahwa pada tahun 2008 hanya terdapat 3 buah sekolah dasar, dan 1 buah sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP).

f. Sarana Desa

Sarana-sarana untruk pelayanan terhadap masyarakat yang dimiliki oleh desa teluk ketapang hingga saat ini adalah seperti pada tabel IV.4 sebagai berikut :

Tabel IV.4
Klasifikasi sarana desa di Desa Teluk Ketapang

No	Sarana Desa	Jumlah
1	Aula / Ruang Pertemuan	1 Buah
2	Badan Perwakilan Desa	1 Buah
3	PUSKESMAS	1 Buah
4	PKK	1 Buah
5	Posyandu	3 Buah
Jumlah		7 buah

Sumber: Monografi Desa Teluk Ketapang, 2009

g. Perhubungan

Faktor Perhubungan yang merupakan sarana penunjang lajunya pembangunan Desa Teluk Ketapang Kecamatan Merbau adalah perhubungan darat dan laut.

Perhubungan darat dan laut yang telah terbentang dapat menghubungkan Desa Teluk Ketapang dengan desa-desa / kota-kota yang ada di sekitar desa teluk ketapang. Dalam rangka usaha membuka isolasi antara kota dan desa perhubungan darat semakin ditingkatkan, hal ini dapat dilihat bahwa adanya Program Pemerintah untuk membangun jembatan penghubung antara desa Semukut dengan desa alai yang tujuannya untuk mempermudah sarana perhubungan yang dibutuhkan.

h. Agama

Desa Teluk Ketapang Kecamatan Merbau yang berpenduduk 1994 jiwa yang terdiri dari 442 KK dari berbagai suku bangsa dan menganut Agama, dalam kehidupan masyarakat berjalan dengan baik, masyarakat suku melayu dan jawa

pada umumnya beragama islam, mayoritas penduduk desa teluk ketapang beragama Islam.

Setiap penganut Agama yang ada di desa teluk ketapang mempunyai Rumah Ibadat untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, hal ini dapat dilihat pada tabel IV.5 berikut:

Tabel IV.5
Klasifikasi rumah Ibadat di Desa Teluk Ketapang

No	Jenis Rumah Ibadah	Jumlah
1	Masjid	3 Buah
2	Mushala	4 Buah
3	Gereja	-
4	Wihara	1 Buah
5	Pura	-
Jumlah		8 Buah

Sumber: Monografi Desa Teluk Ketapang, 2009

Dari tabel IV.5 di atas dapat dilihat bahwa jumlah rumah ibadah di Desa Teluk Ketapang Kecamatan Merbau Berjumlah 8 buah, yang 7 buahnya merupakan rumah peribadatan umat muslim, dan 1 buah untuk rumah peribadatan Non Muslim.

kehadiran BPD diharapkan mampu memberikan pemberdayaan dan pencerdasan kepada masyarakat desa untuk membangun kemandirian, kreatifitas, mengatur rumah tangga sendiri dan membuka ruang bagi masyarakat desa turut serta dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dilevel desanya masing-masing (Zulfan Heri, 2003: 5).

IV.2. Struktur Organisasi Kantor Kepala Desa Teluk Ketapang

1. Struktur Organisasi

Perangkat Pemerintah Desa, jumlah keseluruhannya berjumlah 14 orang dengan perincian :

- a.. Kepala Desa : 1
- b. BPD : 9
- c. Sekretaris Desa : 1
- d. Kepala Dusun : 3

2. Kedudukan dan tugas

a. Kepala Desa

Kedudukannya : sebagai kepala wilayah yang memimpin penyelenggaraan pemerintah ditingkat desa yang bertanggung jawab pada masyarakat melalui BPD dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada bupati dengan tembusan kepada camat.

Tugas : memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, membina kehidupan masyarakat desa, membina perekonomian masyarakat desa, memelihara ketertiban dan ketentraman desa, mendamaikan perselisihan masyarakat desa, mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan.

b. Sekretaris Desa

Kedudukan : unsur staf yang berada langsung di bawah Desa dalam menyelenggarakan segala urusan.

Tugas : membantu desa dalam melaksanakan segala tugasnya, pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administrasi.

c. Kepala Dusun

Tugasnya : membantu tugas kepala desa maupun sekretaris desa dalam menjalankan roda pemerintahan maupun dalam pembangunan.

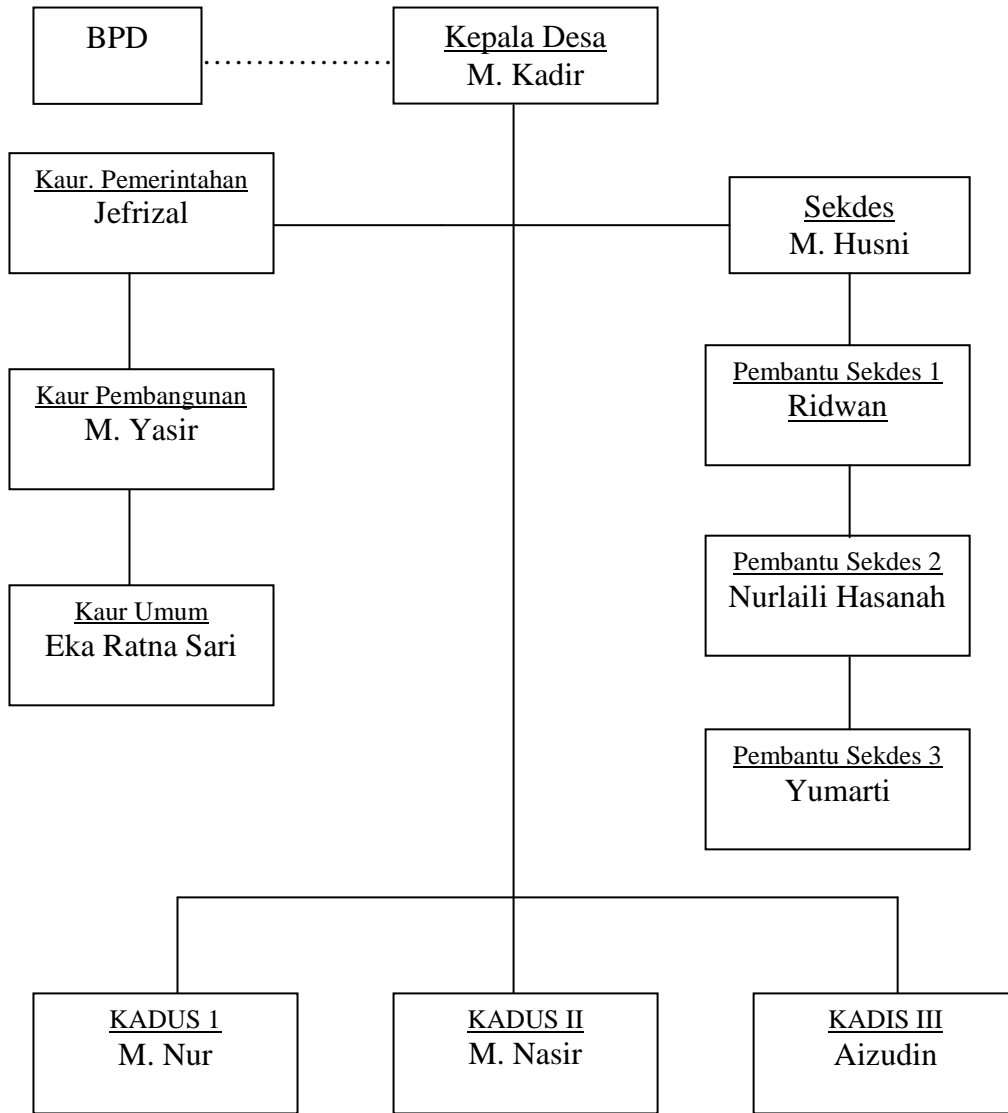
d. BPD

Tugasnya : membantu pimpinan dalam menyelenggarakan administrasi dan pelayanan.

Fungsinya :

1. Menetapkan peraturan desa bersama kepala desa
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat
3. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa
4. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa
5. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa

Bagan IV.1.
Struktur Organisasi Pemerintah Desa Teluk Ketapang



Sumber: Monografi Desa Teluk Ketapang, 2009

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Di dalam Bab ini dibahas tentang penyajian data yang diperoleh selama masa penelitian, data tersebut akan disajikan dalam bentuk diskripsi sesuai dengan jumlah sampel yang berjumlah 90 orang.

Untuk memperoleh data maka digunakan teknik pengumpulan data dengan cara penyebaran kuesioner, wawancara langsung dan buku-buku yang berhubungan dengan penelitian. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini bersifat tertutup dan responden hanya memilih salah satu jawaban yang tersedia. Setiap pertanyaan yang tersedia dalam kuesioner akan didistribusikan dalam bentuk tabel dan selanjutnya akan didistribusikan.

Hasil penelitian akan dibagi ke dalam dua bagian yang meliputi :

1. Bagian pertama berisikan pertanyaan yang memuat identitas Responden yang terdiri dari 3 pertanyaan.
2. Bagian ke dua berisikan pertanyaan dari satu variabel penelitian analisis fungsi kepala desa dalam menggerakkan sumber daya manusia “studi kasus pembangunan fisik didesa teluik ketapang kecamatan merbau kabupaten bengkalis”, yang terdiri dari lima bagian yaitu, penggerakan yang dilakukan oleh kepala desa, pembninaan kehidupan masyarakat oleh kepala desa, membina perekonomian desa, pertemuan-pertemuan dalam mengevaluasi pembangunan desa, bimbingan oleh kepala desa.

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dari kuesioner tersebut, dibawah ini disajikan tabel-tabel yang disertai dengan jawaban responden kemudian diinterpretasikan sebagai berikut :

V.1. Identitas Responden

Berdasarkan kuesioner yang di sebarakan kepada Responden, maka diperoleh data sebagai berikut :

1. Tingkat Pendidikan Responden Dari Aparat Pemerintahan Desa

Pendidikan yang merupakan suatu usaha guna mengetahui keperibadian dan kemampuan seseorang. Berdasarkan hasil penelitian penulis di desa teluk ketapang, maka dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan aparat pemerintahan desa tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel V.1
Jumlah Responden (Aparat Pemdes) menurut tingkat pendidikan pada Desa Teluk Ketapang

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	SD	3	21 %
2	SLTP/Sederajat	4	36,7 %
3	SLTA/Sederajat	1	10,5 %
4	D III	2	15,7 %
5	Sarjana (S.I)	1	10,5 %
Jumlah		11	100%

Sumber Data : Penelitian Tahun 2009

Dari tabel V.I. di atas dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan aparat Pemerintahan desa di Desa Teluk Ketapang yang terdiri dari 11 orang Responden adalah 3 orang berpendidikan SD atau (21%) dan 4 orang berpendidikan SLTP atau (36,7%) 1 orang berpendidikan SLTA atau (10,5%) dan yang berpendidikan

D.III 2 orang atau (15,7%) sedangkan yang mengecam pendidikan S.I adala 1 orang atau (10,5%). Maka dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa Aparat Pemerintahan Desa dalam Penelitian ini Ternyata Sebagian Besar berada pada jenjang pendidikan SD yang berarti termasuk kategori rendah.

2. Tingkat Pendidikan Responden Berdasarakan Kepala Keluarga

Selain itu dapat juga kiranya dilihat di sini mengenai tingkat pendidikan dari para kepala keluarga (KK) di Desa Teluk Ketapang, yaitu :

Tabel V.2
Jumlah Responden Menurut Tingkat Pendidikan.

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	SD	22	27,84 %
2	SLTP/Sederajat	28	35,44 %
3	SLTA/Sederajat	25	31,64 %
4	Perguruan tinggi	4	5,06 %
Jumlah		79	100%

Sumber: Penelitian Tahun 2009

Dari data diatas, dapat dilihat bahwa jumlah responden yang berpendidikan SMP merupakan jumlah responden terbanyak yakni 28 Orang (**33,70%**), responden yang berpendidikan SD sebanyak 22 orang (**28,08%**) dan jumlahresponden yang berpendidikan SMU seanyak 25 orang (**30,33%**) sedangkan responden yang berpendidikan sarjana sebanyak 4 orang (7,86%). Dari tabel diatas juga dapat dilihat tingkat pendidikan masyarakat di Desa Teluk Ketapang sudah cukup baik.

3. UMUR RESPONDEN

Umur sangat mempengaruhi seseorang dalam mengambil keputusan, berpikir dan bertindak. Supaya apa yang telah dilakukan tidak merugikan dirinya dan orang lain, tingkat umur juga sering dijadikan standar seseorang apakah sudah dewasa. Umur sangat berpengaruh dalam seseorang menentukan pilihan, apakah keputusan yang telah diambil benar-benar dapat dijadikan acuan kedepannya.

Tabel V.3
Jumlah Responden Berdasarkan Tingkat Umur.

No	Tingkat Umur	Jumlah	Persentase
1	17-25	16	16,66%
2	26-34	24	26,66%
3	35-43	30	33,33%
4	44 Keatas	20	22,20%
Jumlah		90	100%

Sumber: Data Olahan Lapangan, Tahun 2009

Dari data diatas dapat dilihat bahwa tingkat umur responden terbanyak adalah pada tingkat umur 35-43 tahun yaitu 36 orang atau 34,40%, tingkat umur 17-25 sebanyak 16 orang responden atau 16,65%, sedangkan tingkat umur 26-34 berjumlah 24 orang atau 26,86%, dan umur 44 keatas berjumlah 20 orang responden atau 22,20%.

Dari data diatas dapat dilihat bahwa tingkat umur responden sudah cukup dewasa dalam menentukan keputusan apa yang terbaik untuk dirinya dan apa yang terbaik menurutnya dan untuk masyarakat sekitarnya.

V.2. Studi Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Pada Desa Teluk Ketapang

Dalam pelaksanaan pembangunan desa, sebagai penanggung jawab utama pembangunan di desa memegang peran yang sangat penting dalam menggerakkan berbagai potensi yang ada di desa, agar dapat dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat desa.

Untuk menggerakkan potensi itu yang dalam hal ini adalah masyarakat maka kepala desa harus melakukan sikap atau tindakan sebagai berikut:

1. menginstruksikan Perintah-Perintah
2. pemberian petunjuk
3. pembimbingan
4. melakukan rapat koordinasi
5. pertemuan-pertemuan

Sehubungan dengan tindakan Kepala desa ini guna mendorong percepatan pembangunan sarana Ibadah dan sarana Olahraga tahun 2009 di Desa Teluk Ketapang Kecamatan Merbau Kabupaten Bengkalis, maka berikut ini akan diuraikan dan dianalisis tindakan-tindakan Kepala Desa dalam menggerakkan sumber daya manusia.

1. Perintah Penggerakan atau instruksi dari Kepala Desa

- a. penggerakan yang dilakukan oleh pemerintahan desa

Salah satu bentuk kewenangan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin adalah kewenangan memberi perintah, perintah diperlukan agar orang-

orang yang dipimpin dapat digerakan untuk menjalankan suatu kegiatan agar kepentingan kepentingan bersama dapat terwujud.

Sehubungan dengan pemberian perintah guna menggerakkan masyarakat di Desa Teluk Ketapang guna melaksanakan pembangunan infrastruktur, Kepala Desa pada perinsipnya telah dilakukan, hal ini diketahui baik melalui pengumuman yang ditempelkan di kantor desa, juga berdasarkan informasi dari kepala desa maupun anggota LKMD serta RW/RT yang ada di desa teluk ketapang.

Hasil wawancara dengan kepala desa dan ketua LKMD diperoleh informasi bahwa perintah untuk mengikuti gotong royong, guna mempercepat penyelesaian pekerjaan pembangunan sarana fisik desa telah diberikan kepada Masyarakat melalui pengumuman dan juga melalui RW/RT guna menyebarluaskan perintah Kepala desa tersebut.

Selanjutnya untuk mengetahui apakah RW/RT mendapat ajakan atau perintah dari kepala desa untuk mengikuti kegiatan gotong royong dapat dilihat tanggapannya seperti data tabel berikut:

Tabel V.4
Tanggapan RT/RW mengenai pengerakan yang diberikan oleh Kepala Desa

No	Kategori penilaian	Jumlah	Persentase
1.	Mendapat perintah	9	81,81 %
2.	Tidak mendapat perintah	1	9,09 %
3.	Tidak tahu	1	9,09 %
Jumlah		11	100 %

Sumber : Data Penelitian 2009

Dari uraian tabel diatas dapat di gambarkan bahwa sekalipun perintah sudah disampaikan oleh kepala desa ke semua perangkat desa ternyata tidak semua perangkat desa mendapat perintah dari kepala desa untuk berpartisipasi dalam meningkatkan pembangunan desa.

Salah seorang informan yang menyatakan tidak mendapat perintah menyatakan ia tidak mendapat pemberitahuan secara langsung dari kepala desa, tapi ia tahu bahwa kepala desa mengajak RW/RT untuk menggerakkan masyarakat untuk gotong royong .

Sementara seorang informan yang menyatakan tidak tahu karna ia tidak pernah merasa diajak ataupun diperintahkan untuk menggerakkan masyarakat untuk gotong royong.

Dari uraian dan analisis data diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sekalipun perintah telah diberikan oleh kepala desa kepada RW/RT tapi ternyata masih ada pimpinan masyarakat yang belum merasa belum diajak oleh kepala desa dalam bergotong royong atau berpartisipasi dalam meningkatkan pembangunan, sehingga kegiatan perintah yang dilakukan kepala desa dikategorikan cukup baik.

Tabel V.5
Tanggapan kuesioner mengenai penggerakan dari Kepala Desa

No	Kategori penilaian	Jumlah	Persentase
1.	Mendapat perintah	45	56,96 %
2.	Tidak mendapat perintah	6	7,59 %
3.	Tidak tahu	28	35,44 %
Jumlah		79	100%

Sumber: Data Olahan 2009

Data tabel V.5 diatas, menunjukkan bahwa responden yang membeikan tanggapan mengenai perintah yang dilakukan oleh kepala desa teluk ketapang termasuk kategori baik yakni sebanyak 45 orang reponden atau 56,96 % menyatakan mendapat perintah, sedangkan memberikan tanggapan tidak mendapat perintah 6 orang responden atau 7,59 %, dan yang memberikan tanggapan tidak tahu 28 orang responden atau 35,44 %.

Jadi persentase keberhasilan mengenai perintah yang di sampaikan oleh kepala desa adalah 45 reponden atau 56,96 % (mendapat perintah).

b. peran aktif kepala desa dalam menggerakan masyarakat

Guna mengetahui peran aktif atau tidaknya kepala desa dalam menggerakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam meningkatkan pembangunan desa dapat dipaparkan jawaban responden di bawah ini :

Tabel V.6
Tanggapan RT/RW mengenai peran atau tidaknya kepala desa dalam
menggerakkan masyarakat

No	Kategori penilaian	Jumlah	Persentase
1.	Ya	9	81,81 %
2.	Tidak	-	-
3.	Kadang-kadang	2	18,18 %
4.	Tidak tahu	-	-
Jumlah		11	100 %

Sumber : Data Penelitian 2009

Dari tabel V.6 diatas, menunjukkan bahwa responden yang memberikan tanggapan mengenai berperan aktif atau tidaknya kepala desa dalam menggerakkan masyarakat untuk meningkatkan pembangunan desa, yang memberi tanggapan ya yakni sebanyak 9 orang responden atau 81,81 %. Sedangkan yang memberikan tanggapan kadang-kadang yakni sebanyak 2 orang responden atau 18,18 %.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan dari masyarakat desa mengenai berperan atau tidaknya kepala desa dalam mengerakan masyarakat dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel V.7
Tanggapan Responden mengenai berperan aktif atau tidaknya kepala desa dalam menggerakkan masyarakat

No	Kategori penilaian	Jumlah	Persentase
1.	Ya	45	56,96 %
2.	Tidak	6	7,59 %
3.	Kadang-kadang	28	35,44 %
4	Tidak tahu	-	-
Jumlah		11	100 %

Sumber : Data Penelitian 2009

Dari tabel V.7 diatas, menunjukkan bahwa responden yang memberikan tanggapan mengenai berperan aktif atau tidaknya kepala desa dalam menggerakkan masyarakat untuk meningkatkan pembangunan desa, yang memberi tanggapan ya yakni sebanyak 45 orang responden atau 56,96 %. Sedangkan yang memberikan tanggapan tidak yakni sebanyak 6 orang responden atau 7,59 %, dan yang memberikan tanggapan kadang-kadang yakni sebanyak 28 orang responden atau 35,44 %.

Jadi persentase berperan aktif atau tidaknya kepala desa dalam menggerakkan masyarakat untuk melaksanakan pembangunan adalah 45 orang responden atau 56,96 %. (ya).

c.dasar perintah yang dibuat

Demi terarahnya pembangun yang sesuai dengan kebutuhan desa, maka dasar dari perintah yang dibuat harus bwntuk dan tujuanya.berdasarkan hasil

wawancara dengan LKMD diperoleh informasi bahwa dasar dari sebuah perintah yang dilakukan tercantum dalam agenda yang di buat oleh kepala desa.

Perintah yang dilakukan sudah semestinya mempunyai landasan yang kuat, agar masyarakat dapat sepenuhnya mengikuti instruksi yang diberikan dan mudah dalam mencermati perintah yang telah dikeluarkan.

Guna mengetahui dasar yang telah dipegang oleh kepala desa dalam memberikan perintah dapat dipaparkan melalui tabel hasil jawaban responden.

Tabel V.8
Jawaban responden RW/RT mengenai dasar perintah yang dikeluarkan.

No	Kategori penilaian	Jumlah	Persentase
1.	Buku pedoman tata usaha	6	54,54 %
2.	Buku harian tata usaha	3	27,27 %
3.	Peraturan daerah	-	-
4.	Tidak tahu	2	18,18 %
Jumlah		11	100 %

Sumber : Hasil Penelitian 2009

Dari tabel V.8 diatas, menunjukkan bahwa responden yang menyatakan perintah dibuat berdasarkan buku pedoman tata usaha yakni sebanyak 6 orang responden atau 54,54 %, sedangkan yang menyatakan perintah berdasarkan buku harian tata usaha sebanyak 3 orang responden atau 27,27 %. dan responden yang menyatakan tidak tahu 1 orang responden atau 18,18 %.

Berdasarkan hasil wawancara, salah seorang informan menyatakan tidak mengetahui dasar apa yang dipegang oleh kepala desa dalam mengeluarkan perintah.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan dari masyarakat desa mengenai dasar perintah yang dikeluarkan oleh kepala desa dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel V.9
Jawaban responden mengenai dasar perintah yang dikeliarkan.

No	Kategori penilaian	Jumlah	Persentase
1.	Buku pedoman tata usaha	43	54,43 %
2.	Buku harian tata usaha	6	7,59 %
3.	Peraturan daerah	-	-
4.	Tidak tahu	30	37,97 %
Jumlah		79	

Sumber : Hasil Penelitian 2009

Dari tabel V.9 diatas, menunjukkan bahwa respondn yang menyatakan perintah dibuat berdasarkan buku pedoman tata usaha yakni sebanyak 43 orang responden atau 54,43 %, sedangkan yang menyatan perintah berdasarkan buku harian tata usaha sebanyak 6 orang responden atau 7,59 %.dan responden yang menyataka tidak tahu 30 orang responden atau 37,97 %.

Jadi persentase keberhasilan mengenai dasar perintah yang di sampaikan oleh kepala desa dalam meningkatkan pembengunan di desa teluk ketapang adalah 43 reponden atau 54,43 % (perintah berdasarkan buju pedoman tata usaha).

d. hambatan

Guna mengetahui hambatan-hambatan dalam pengerakan yang dilakukan oleh kepala desa dapat dipaparkan jawaban responden di bawah ini :

Tabel V.10
Jawaban RT/RW mengenai hambatan dalam menjalankan penggerakan oleh kepala desa

No	Kategori penilaian	Jumlah	Persentase
1.	ada	1	9,09 %
2.	tiak ada	9	81,81 %
3.	Tidak tahu	1	9,09 %
Jumlah		11	100 %

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan 2009

Dari tabel V.10 diatas, menunjukkan bahwa responen yang memberikan tanggapan mengenai hambatan dalam menjalankan penggerakn oleh kepala desa yang mengatakan ada 1 orang responden atau 9,09 %, sedangkan memberikan tanggapan tidak ada yakni sebanyak 9 orang responden atau 81,81 %, dan memberikan tanggapan tidak tahu ada 1 orang responden atau 9,09 %.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan dari masyarakat desa mengenai hambatan dalam mengerakan masyarakat oleh kepala desa dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel V.11
Jawaban masyarakat mengenai hambatan dalam menjalankan penggerakan oleh kepala desa

No	Kategori penilaian	Jumlah	Persentase
1.	ada	45	56,96 %
2.	tiak ada	6	7,59 %
3.	Tidak tahu	28	35,44 %
Jumlah		79	

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan 2009

Dari tabel V.11 diatas, menunjukkan bahwa responden yang memberikan tanggapan mengenai hambatan dalam menjalankan penggerakn oleh kepala desa yang mengatakan ada 45 orang responden atau 56,96 %, sedangkan memberikan tanggapan tidak ada yakni sebanyak 6 orang responden atau 7,59 %, dan memberikan tanggapan tidak tahu ada 28 orang responden atau 35,44 %.

Jadi persentase dari tanggapan responden terhadap hambatan dalam menggerakan masyarakat oleh kepala desa secara garis besarnya tidak ada yaitu 45 orang responde atau 56,96 % (tidak ada)

2. Pembinaan Kehidupan Masyarakat

a. pembinaan terhadap masyarakat

Melakukan pembinaan dalam menggerakan masyarakat di desa teluk ketapang dilaksanakan oleh pemerintahan desa. Hal ini diketahui dari hasil wawancara dengan kepala desa dan ketua LKMD dipeoleh informasi bahwa pembinaan terhadap masyarakat guna mempercepat pembanguna fisik desa telah dilakukan sebaik mungkin bersama pihak yang terkait.

Selanjutnya untuk mengetahui apakah RT/RW mendapat pembinaan dari kepala desa utuk meningkatkan pembangunan di desa dapat dilihat tanggapanya dapat dipaparkan sebagai berikut :

Tabel V.12
Tanggapan perangkat desa mengenai pembinaan yang dilakukan oleh kepala desa

No	Kategori penilaian	Jumlah	Persentase
1.	Mendapat pembinaan	9	81,81 %
2.	Tidak mendapat pembinaan	1	9,09 %
3.	Tidak tidak tahu	1	9,09 %
Jumlah		11	100 %

Sumber: Penelitian 2009

Dari tabel V.12 diatas, menunjukkan bahwa responden yang memberikan tanggapan mengenai pembinaan yang dilakukan oleh kepala desa termasuk karagori baik yakni sebanyak 9 orang responden atau 81,81 % menyatakan mendapat pembinaan, sedangkan memberikan tanggapan tidak mendapat pembinaan yakni sebanyak 1 orang responden atau 9,09 %, dan memberikan tanggapan tidak tahu ada 1 orang responden atau 9,09 %.

Berdasarkan penelitian salah seorang informn menyatakan pembinaan yang dilakukan oleh kepala desa kurang baik, hal ini didasarkan kurangnya informasi yang sampai kepada beliau.

Sementara seorang informan menyatakan tidak baik karena dia tidak pernah merasa mendapat pembnaan dari kepala desa untuk meningkatkan pembangunan didesa.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan dari masyarakat desa mengenai pembinaan yang dilakukan oleh kepala desa dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel V.13
Tanggapan responden mengenai pembinaan yang dilakukan oleh kepala desa.

No	Kategori penilaian	Jumlah	Persentase
1.	Mendapat pembinaan	60	75,94 %
2.	Tidak mendapat pembinaan	10	12,65 %
3.	Tidak tahu	9	11,39 %
Jumlah		79	100%

Sumber: Penelitian 2009

Dari tabel V.13 diatas, menunjukkan bahwa responden yang memberikan tanggapan mengenai pembinaan oleh kepala desa termasuk katgori baik yakni 60 orang responden atau 75,94 % yang menyatakan mendapat pembinaan dari kepala desa, sedangkan memberikan tanggapan tidak mendapat pembinaan yakni sebanyak 10 orang responde atau 12,65 %, dan yang memberikan tanggapan tidak tahu ada 9 orang responden atau 11,39 %.

Jadi persentase pembinaan yang dilakukan oleh kepala desa dalam meningkatkan pembangunan desa adalah 75,94 % (baik).

b. bentuk-bentuk pembinaan

bentuk-bentuk pembinaan yang dilakukan oeh kepala desa dalam meningkatka pembangunan desa haruslah jelas bentuk dan tujuanya, dan untuk apa pembinaan itu dilakukan. Berdasarkan hasil wawancara denga masyarakat desa diperoleh informasi bahwa bentuk pembinaan yang dilakukan oleh kepala desa hanya bersipat serimonial saja.

Selanjutnya untuk mengetahui apa bentuk-bentuk pembinaan yang dilakukan oleh kepala desa dapat dilihat pada tabe dibawah ini:

Tabel V.14
Tanggapan RT/RW mengenai bentuk pembinaan dari kepala desa

No	Kategori penilaian	Jumlah	Persentase
1.	Baik	9	81,81 %
2.	Kurang Baik	1	9,09 %
3.	Tidak Baik	1	9,09 %
4	Tidak tahu	-	-
Jumlah		11	100 %

Sumber : Peneliti 2009

Tabel V.14 diatas, menggambarkan bahwa responden yang memberikan tanggapan mengenai bentuk pembinaan yang dilakukan oleh kepala desa dalam meningkatkan pembangunan desa yang termasuk kategori baik yakni sebanyak 9 orang responden atau 81,81 %, sedangkan memberikan tanggapan kurang baik yakni sebanyak 1 orang responden atau 9,09 %, yang memberi tanggapan tidak baik yakni 1 orang responden atau 9,09 %.

Selanjutnya dapat dilihat tanggapan masyarakat mengenai pembinaan yang telah dilakukan oleh kepala desa dalam meningkatkan pembangunan desa teluk ketapang dipaparkan melalui tabel dibawah ini:

Tabel V.15
Tanggapan responden mengenai bentuk pembinaan dari kepala desa

No	Kategori penilaian	Jumlah	Persentase
1.	Baik	60	75,94 %
2.	Kurang Baik	10	12,65 %
3.	Tidak Baik	9	11,39 %
4	Tidak tahu	-	
Jumlah		79	100%

Sumber : Penelitian 2009

Dari tabel V.15 diatas, menunjukkan bahwa responden yang memberikan tanggapan mengenai bentuk pembinaan oleh kepala desa termasuk katgori baik yakni 60 orang responden atau 75,94 %, sedangkan memberikan tanggapan kurang baik yakni sebanyak 10 orang responde atau 12,65 %, dan yang memberikan tanggapan tidak baik ada 9 orang responden atau 11,39 %.

Jadi persentase bentuk pembinaan yang dilakukan oleh kepala desa dalam meningkatkan pembangunan desa adalah 60 orang responden atau 75,94 % (baik).

c. Keadaan Perekonomian Desa

Dalam meningkatkan pembangunan desa yang lebih memadai, keadaan perekonomian desa merupakan salah satu faktor penunjang untuk meningkatkan pembangunan desa.

Guna mengetahui kadaan perekonomia desa dapat dipaparkan tanggapan respoden melalaui tabel hasil jawaban responden di bawah ini :

Tabel V.16
Jawaban responden mengenai perekonomian desa

No	Kategori penilaian	Jumlah	Persentase
1.	Baik	80	88,88 %
2.	Kurang Baik	6	6,66 %
3.	Tidak Baik	4	4,44 %
Jumlah		90	100%

Sumber : Penelitian 2009

Dari tabel V.16 diatas, menunjukan bahwa responden yang memberikan tanggapan mengenai perekonomian desa teluk ketapang termasuk kategori baik sebanyak 80 prang responden atau 88,88%, sedangkan memberikan tanggapan kurang baik yakni sebanyak 6 orang responden atau 6,66 %, dan reponden yang memberikan tanggapan tiak baik sebanyak 4 orang atau 4,44 %.

Jadi persentase keadaan perekonomian desa teluk ketapang pada saat ini di kategorikan baik. Yakni sesuai dengan jawaban responden 80 orang atau 88,88 % (baik).

d. hambatan dalam menerima pembinaan dari kepala desa

Guna mengetahui hambatan-hambatan dalam menerima pembinaan dari kepala desa dapat dipaparkan jawaban responden di bawah ini :

Tabel V.17
Jawaban RT/RW mengenai hambatan dalam pembinaan masyarakat
oleh kepala desa

No	Kategori penilaian	Jumlah	Persentase
1.	ada	1	9,09 %
2.	tiak ada	9	81,81 %
3.	Tidak tahu	1	9,09 %
Jumlah		11	100 %

Sumber : Hasil Peneliti Lapangan 2009

Dari tabel V.17 diatas, menunjukkan bahwa responen yang memberikan tanggapan mengenai hambatan tentang pembinaan oleh kepala desa yang mengatakan ada 1 orang responden atau 9,09 %, sedangkan memberikan tanggapan tidak ada yakni sebanyak 9 orang responden atau 81,81 %, dan memberikan tanggapan tidak tahu ada 1 orang responden atau 9,09 %.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan dari masyarakat desa mengenai hambatan dalam mengerakan masyarakat oleh kepala desa dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel V.18
Jawaban masyarakat mengenai hambatan dalam pembinaan masyarakat
oleh kepala desa

No	Kategori penilaian	Jumlah	Persentase
1.	ada	45	56,96 %
2.	tiak ada	6	7,59 %
3.	Tidak tahu	28	35,44 %
Jumlah		79	

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan 2009

Dari tabel V.18 diatas, menunjukkan bahwa responden yang memberikan tanggapan mengenai hambatan dalam menjalankan penggerakn oleh kepala desa yang mengatakan ada 45 orang responden atau 56,96 %, sedangkan memberikan tanggapan tidak ada yakni sebanyak 6 orang responden atau 7,59 %, dan memberikan tanggapan tidak tahu ada 28 orang responden atau 35,44 %.

Jadi persentase dari tanggapan responden terhadap hambatan dalam menggerakan masyarakat oleh kepala desa secara garis besarnya tidak ada yaitu 45 orang responde atau 56,96 % (tidak ada)

3. pemberian petunjuk

Sehubungan dengan pemberian petunjuk guna menggerakan masyarakat di Desa Teluk Ketapang guna melaksanakan pembangunan pada perinsipnya telah di lakukan.

Berdasarkan hasil penelitian di desa teluk ketapang diperoleh informasi bahwa petunjuk untuk mengikuti gotong royong, guna mempercepat penyelesaian pembangunan sarana fisik di desa telah di berikan kepada masyarakat melalui pengumuman dan juga melalui RW/RT guna menyebar luaskan perintah kepala desa trsebut.

Selanjutnya untuk mengetahui apakah masyarakat serta perangkat desa mendapat ajakan atau petunjuk dari kepala desa untuk mengikuti kegiatan pembangunan desa dapat dilihat tanggapanya seperti data tabel berikut :

Tabel V.19
Tanggapan perangkat desa mengenai petunjuk dari kepala desa

No	Kategori penilaian	Jumlah	Persentase
1.	Mendapat petunjuk	10	90,90 %
2.	Tidak mendapat petunjuk	1	9,09 %
3.	Tidak tahu	-	
Jumlah		11	100 %

Sumber : Penelitian 2009

Dari tabel V.19 diatas, menunjukkan bahwa responden yang memberi tanggapan mengenai petunjuk yang diberikan oleh kepala desa dalam meningkatkan pembangunan desa teluk ketapang dikategorikan baik yakni sebanyak 10 orang responden atau 90,90 % menyatakan mendapat perintah dari kepala desa. Sedangkan yang menyatakan tidak mendapat petunjuk yakni 1 responden atau 9,09 %.

Berdasarkan hasil wawancara dari salah seorang informan yang menyatakan ia tidak mendapat petunjuk secara langsung dari kepala desa, tapi ia tahu bahwa kepala desa mengajak RW/RT untuk menggerakkan masyarakat dalam mengembangkan desa.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan dari masyarakat desa mengenai petunjuk dalam mengerakan masyarakat oleh kepala desa dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel V.20
Tanggapan responden mengenai petunjuk dari Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa

No	Kategori penilaian	Jumlah	Persentase
1.	Mendapat petunjuk	54	60 %
2.	Tidak mendapat petunjuk	6	6,66 %
3.	Tidak tahu	30	33,33 %
Jumlah		90	100%

Sumber: Hasil Penelitian 2009

Dari tabel V.20 diatas, menunjukkan bahwa responden yang menyatakan mendapat petunjuk mengenai penggerakan oleh aparat desa dalam meningkatkan pembangunan sebanyak 54 responden atau 60 %,sedangkan yang menyaakan tidak mendapat petunjuk sebanyak 6 responden atau 6,66 %, dan responden yang menyatak tidak tahu 30 atau 33,33 %.

Jadi persentase mengenai petunjuk dari aparatur desa dalam meningkatkan pembangunan desa teluk ketapang adalah 54 orang responden atau 60 %. Dikategorikan (baik).

4. pertemuan-pertemuan

a. pertemuan-pertemuan

Pertemuan dalam menggerakan masyarakat di desa teluk ketapang dilaksanakan oleh kepala desa, hal ini diketahui dari hasil wawancara dengan kepala desa dn ketua LKMD diperoleh informasi bahwa pertemuan-pertemuan untuk mengikuti gotong royong dalam menyelesaikan pembengunan sarana fisik desa telah dilakukan.

Selanjutnya untuk mengetahui apakah RT/RW menapat ajakan untuk mengikuti kegiatan gotong royong tersebut dapat dilihat tanggapannya sperti data tabel dibawah ini :

Tabel V.21
Tanggapan RT/RW tentang pertemuan dari kepala desa

No	Kategori penilaian	Jumlah	Persentase
1.	Melakukan Pertemuan	9	81,81 %
2.	Tidak Melakukan Pertemuan	1	9,09 %
3.	Tidak Tahu	1	9,09 %
Jumlah		11	100 %

Sumber : Hasil Penelitian 2009

Dari tabel V.21 diatas, menunjukan bahwa responen yang memberikan tanggapan mengenai pertemuan yang dilakukan oleh kepala desa termasuk karagori baik yakni sebanyak 9 orang responden atau 81,81 % menyatakan melakukan pertemuan, sedangkan memberikan tanggapan tidak ada pertemuan yakni sebanyak 1 orang responden atau 9,09 %, dan yang tiak tahu ada 1 orang responden atau 9,09 %.

Dari tabel diatas menggambarkan bahwa pertemuan sudah dilakukan oleh kepala desa kepada RT/RW, tetapi oleh kepala desa untuk mengajak masyarakat bergotong royong belum maksimal.

Salah seorang informan yang menyatakan tidak mendapat perintah menyatakan ia tidak mendapat pemberitahuan secara langsung dari kepala desa, tapi ia tahu bahwa kepala desa mengajak RW/RT untuk menggerakan masyarakat untuk gotong royong .

Salah seorang informan yang menyatakan tidak mengetahui kepala desa melakukan pertemuan untuk mengerkan masyarakat dalam bergotong royong.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan dari masyarakat desa mengenai hambatan dalam mengerkan masyarakat oleh kepala desa dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel V.22
Tanggapan masyarakat tentang pertemuan dari kepala desa

No	Kategori penilaian	Jumlah	Persentase
1.	Melakukan Pertemuan	45	56,96 %
2.	Tidak Melakukan Pertemuan	6	7,59 %
3.	Tidak Tahu	28	35,44 %
Jumlah		79	100%

Sumber: Hasil Penelitian 2009

Data tabel V.22 diatas, menunjukkan bahwa responden yang membeikan tanggapan mengenai pertemuan yang dilakukan oleh kepala desa teluk ketapang termasuk kategori baik yakni sebanyak 45 orang reponden atau 56,96 % menyatakan mendapat instruksi untuk melakuakn pertemuan, sedangkan memberikan tanggapan tidak melakukan pertemuan 6 orang responden atau 7,59 %, dan yang memberikan tanggapan tidak tahu 28 orang responden atau 35,44 %.

Jadi persentase keberhasilan mengenai perintah yang di sampaikan oleh kepala desa adalah 45 reponden atau 56,96 % (melakukan pertemuan).

b. Waktu Pertemuan

Guna mengetahui waktu pertemuan yang sering dilakukan oleh kepala desa dalam meningkatkan pembangunan dapat dipaparkan melalui tabel hasil jawaban responden dibawah ini :

Tabel V.23
Tanggapan perangkat desa mengenai waktu pertemuan yang dilakukan oleh kepala desa

No	Kategori penilaian	Jumlah	Persentase
1.	Setiap waktu	-	-
2.	Setiap ada kegiatan desa	9	81,81 %
3.	Tidak tahu	2	18,18 %
Jumlah		11	100 %

Sumber: Hasil Penelitian 2009

Dari tabel V.23 diatas, menunjukkan bahwa responen yang memberikan tanggapan mengenai waktu pertemuan yang dilakukan oleh kepala desa yang menjawab setiap ada kegiatan desa yakni sebanyak 9 orang responden atau 81,81 %, sedangkan memberikan tanggapan tidak tahu yakni sebanyak 2 orang responden atau 18,18 %.

Berdasarkan penelitian salah seorang informan menyatakan waktu yang dilakukan oleh kepala desa dalam melakukan pertemuan-pertemuan hampir tidak ada, hal ini didasarkan kurangnya informasi yang sampai kepada beliau.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan dari masyarakat desa mengenai waktu pertemuan yang dilakukan oleh kepala desa dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel V.24
Tanggapan masyarakat tentang pertemuan oleh kepala desa

No	Kategori penilaian	Jumlah	Persentase
1.	Setiap waktu	-	-
2.	Setiap ada kegiatan desa	51	64,55 %
3.	Tidak tahu	28	35,44 %
Jumlah		79	100%

Sumber : Hasil Penelitian 2009

Data tabel V.24 diatas, menunjukkan bahwa responden yang memberikan tanggapan mengenai waktu pertemuan yang dilakukan oleh kepala desa teluk ketapang yang memberikan tanggapan pertemuan dilakukan setiap ada kegiatan desa yakni sebanyak 51 orang reponden atau 64,55 %, sedangkan yang menyatakan tidak tahu untuk melakuakn pertemuan 28 orang responden atau 35,44 %,

Jadi persentase pertemuan yang dilakukan oleh kepala desa pada setiap kegiatan adalah 51 reponden atau 64,55 % (melakukan pertemuan).

c. Hambatan-Hambatan

Guna mengetahui hambatan-hambatan dalam melakukan pertemuan-pertemuan dari kepala desa dapat dipaparkan jawaban responden di bawah ini :

Tabel V.25
Jawaban RT/RW mengenai hambatan dalam melakukan pertemuan
oleh kepala desa

No	Kategori penilaian	Jumlah	Persentase
1.	ada	1	9,09 %
2.	tiak ada	9	81,81 %
3.	Tidak tahu	1	9,09 %
Jumlah		11	100 %

Sumber : Hasil Peneliti lapangan 2009

Dari tabel V.25 diatas, menunjukkan bahwa responen yang memberikan tanggapan mengenai hambatan dalam mlakukan pertemuan-pertemuan oleh kepala desa yang mengatakan ada 1 orang responden atau 9,09 %, sedangkan memberikan tanggapan tidak ada yakni sebanyak 9 orang responden atau 81,81 %, dan memberikan tanggapan tidak tahu ada 1 orang responden atau 9,09 %.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan dari masyarakat desa mengenai hambatan dalam melakukan pertemuan-pertemuan oleh kepala desa dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel V.26
Jawaban masyarakat mengenai hambatan dalam melakukan pertemuan-
pertemuan oleh kepala desa

No	Kategori penilaian	Jumlah	Persentase
1.	ada	45	56,96 %
2.	tiak ada	6	7,59 %
3.	Tidak tahu	28	35,44 %
Jumlah		79	100 %

Sumber : Hasil Penelitian 2009

Dari tabel 26 diatas, menunjukkan bahwa responden yang memberikan tanggapan mengenai hambatan dalam melakukan pertemuan-pertemuan oleh kepala desa yang mengatakan ada 45 orang responden atau 56,96 %, sedangkan memberikan tanggapan tidak ada yakni sebanyak 6 orang responden atau 7,59 %, dan memberikan tanggapan tidak tahu ada 28 orang responden atau 35,44 %.

5. Bimbingan-Bimbingan

Bimbingan dalam menggerakkan masyarakat desa teluk ketapang dalam meningkatkan pembangunan dilaksanakan oleh kepala desa, hal ini diketahui dari hasil wawancara dengan kepala desa dan ketua LKMD diperoleh informasi bahwa bimbingan-bimbingan dalam meningkatkan pembangunan sarana fisik desa telah dilakukan.

Selanjutnya untuk mengetahui apakah RT/RW mendapat bimbingan dari kepala desa dalam meningkatkan pembangunan di desa dapat dilihat tanggapannya sebagai berikut :

Tabel V.27
Tanggapan RT/RW tentang bimbingan dari kepala desa

No	Kategori penilaian	Jumlah	Persentase
1.	Ada	9	81,81 %
2.	Tidak Ada	1	9,09 %
3.	Tidak Tahu	1	9,09 %
Jumlah		11	100 %

Sumber : Hasil Penelitian 2009

Dari tabel V.27 diatas, menunjukkan bahwa responen yang memberikan tanggapan mengenai bimbingan yang dilakukan oleh kepala desa termasuk karagori baik yakni sebanyak 9 orang responden atau 81,81 % menyatakan mendapat bimbingan, sedangkan memberikan tanggapan tidak mendapat bimbingan yakni sebanyak 1 orang responden atau 9,09 %, dan yang tiak tahu ada 1 orang responden atau 9,09 %.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan dari masyarakat desa mengenai bimbingan oleh kepala desa dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel V.28
Tanggapan masyarakat tentang bimbingan dari kepala desa

No	Kategori penilaian	Jumlah	Persentase
1.	Ada	45	56,96 %
2.	Tidak Ada	6	7,59 %
3.	Tidak Tahu	28	35,44 %
Jumlah		79	100%

Sumber: Hasil Penelitian 2009

Data tabel V.28 diatas, menunjukkan bahwa responden yang membeikan tanggapan mengenai bimbingan yang dilakukan oleh kepala desa teluk ketapang yang menyatakan ada yakni sebanyak 45 orang reponden atau 56,96 %, sedangkan memberikan tanggapan tidak mendapat bimbingan 6 orang responden atau 7,59 %, dan yang memberikan tanggapan tidak tahu 28 orang responden atau 35,44 %.

Jadi persentase keberhasilan mengenai bimbingan oleh kepala desa adalah 45 reponden atau 56,96 % (mendapat bimbingan).

Secara keseluruhan rekapitulasi dari 90 orang responden penelitian terhadap indikator-indikator pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pada pemerintahan Desa Tasik serai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis, yang mencakup waktu, biaya dan mutu pelayanan dilihat dari tabel berikut :

Tabel V.29
Rekapitulasi Tanggapan Responden Penelitian Tentang Analisis Fungsi Kepala Desa Dalam Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan (Studi kasus pembangunan Fisik di Desa Teluk Ketapang Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti)

No	Variabel	Indikator	Output/hasil penelitian
1.	Penggerakan dari Kepala Desa	<ul style="list-style-type: none"> ➤ penggerakan yang dilakukan oleh pemerintahan desa ➤ peran aktif kepala desa dalam menggerakan masyarakat ➤ dasar perintah yang dibuat ➤ hambatan 	<p>Penggerakan yang dilakukan kepala desa dalam meningkatkan sumberdaya masyarakat alam meningkatkan pembangunan berhasil,hal ini dapat diukur dari jawaban reasponden 54 orang respondn atau 60 % .</p> <p>Keberhasilan pembangunan desa tidak terlepas dari peran aktif kepala desa dalam menggerakan masyarakat, sesuai dengan jawaban responden mengenai peran aktif kepala desa dalam mengerakan masyarakat sudah baik, yakni 54 orang responden atau 60 %.</p> <p>Dari hasi jawaban responden mengenai dasar perintah yang dibuat oleh kepala desa yaitu 49 orang responden atau 54,44 % yayatakan buku pedoman tata usaha, 9 Orang responden atau 10 % menyatakan buku harian tata usaha,dan 32 orang responden menyatakan tidak tahu.</p> <p>Hambatan dalam menerima perintah dari kepala desa berdasarkan jawaban responden yaitu 46 orang responden atau</p>

2.	Pembinaan Kehidupan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> ➤ pembinaan terhadap masyarakat ➤ bentuk-bentuk pembinaan ➤ Keadaan Perekonomian Desa 	<p>51,11 %, menyatakan ada hambatan, 18 orang responden atau 20 % menyatakan tidak ada, dan 29 orang responden atau 32,22 % tidak tahu, jadi hambatan berdasarkan jawaban responden (ada).</p> <p>Dari hasil jawaban responden mengenai pembinaan terhadap masyarakat 69 responden atau 76,66 % menyatakan mendapat pembinaan, 11 responden atau 12,22 % menyatakan tidak mendapat pembinaan, dan 10 responden atau 11,11 % tidak tahu. Jadi pembinaan yang dilakukan oleh kepala desa dikategorikan (mendapat pembinaan).</p> <p>jawaban responden mengenai bentuk pembinaan terhadap masyarakat 69 responden atau 76,66 % baik, 11 responden atau 12,22 % menyatakan tidak baik, dan 10 responden atau 11,11 % tidak tahu. Jadi bentuk pembinaan yang dilakukan oleh kepala desa dikategorikan (baik).</p> <p>Pertumbuhan ekonomi sangat mendukung perkembangan desa, dari hasil penelitian penulis dapat merumuskan berdasarkan hasil jawaban responden yaitu, 80 responden atau 88,88 % mengatakan baik, 6 orang responden atau 6,66 % tidak baik, dan 4 orang responden atau 4,44 % tidak tahu, jadi pertumbuha perekkonomian desa teluk ketapang (baik).</p>
----	--------------------------------	---	--

		➤ Hambatan	Hambatan dalam menerima pembinaan dari pemerintahan desa 46 responden atau 51,11 % ada, 15 responden atau 16,66 % tidak ada, dan 29 responden atau 32,22 % tidak tahu, jadi hambatan dalam menerima pembinaan dari pemerintahan desa dikategorikan (ada) yaitu 51,11 %.
3	pemberian petunjuk	➤ petunjuk Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan	petunjuk dalam melakukan kegiatan sudah dilakukan, jawaban responden 64 orang responden dari 90 responden atau 71,11 % menyatakan (mendapat petunjuk).
4	pertemuan-pertemuan	➤ pertemuan-pertemuan	Pertemuan sudah dilakukan oleh pemerintahan desa, jawaban responden 81,81 % melakukan pertemuan.
		➤ Waktu Pertemuan	Waktu pertemuan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam meningkatkan pembangunan berdasarkan jawaban responden adalah, 66,66 % menyatakan pertemuan dilakukan pada setiap ada kegiatan.
		➤ Hambatan	Hambatan dalam pertemuan yang dilakuakn pemerintahan desa 51,11 % mengatak ada.
5	Bimbingan-Bimbingan	➤ Bimbingan	Bimbingan sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam melakukan kegiatan. Dari hasil jawaban responden 60 % menyatakan mendapat bimbingan dari pemerintahan desa, Jadi pembimbingan suah dilakukan.

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian

Berdasarkan rekapitulasi tanggapan responden pada tabel V.29 diatas dapat dijelaskan bahwa dari jawaban 90 orang responden penelitian ini tentang fungsi kepala desa dalam menggerakkan sumber daya manusia studi kasus pembangunan fisik di desa teluk ketapang kecamatan merbau kabupaten bengkalis adalah sebagai berikut: **penggerakan oleh kepala desa** yang diantaranya penggerakan oleh kepala desa, peran aktif kepala desa dalam meningkatkan sumberdaya masyarakat, dasar perintah, dikatakan baik, yaitu 60 %.

Dari segi **pembinaan kehidupan masyarakat**, diantaranya pembinaan kepada masyarakat, bentuk-bentuk pembinaan, keadaan perekonomian desa jawaban responden yaitu 70-80 % menyatakan baik. Sedangkan **pemberian petunjuk** diantaranya petunjuk dalam menjalani kegiatan yaitu 71,11 % jawaban responden baik. Dari segi **pertemuan-pertemuan** diantaranya pertemuan yang dilakukan pemerintah desa, waktu pertemuan, 50-66 % jawaban responden baik, kecuali hambatan yaitu 51,11 % responden menjawab ada hambatan. **Segi bimbingan** 60 % responden menjawab baik.

Hasil keseluruhan jawaban responden tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa **fungsi kepala desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan studi kasus pembangunan fisik di desa teluk ketapang kecamatan merbau kabupaten bengkalis secara keseluruhan adalah baik.**

BAB VI

PENUTUP

VI.1. Kesimpulan

Sebagai hasil penelitian penulis dengan judul analisis fungsi kepala desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan studi kasus pembangunan fisik di desa teluk ketapang kecamatan merbau kabupaten kepulauan mernti, penulis mempunyai kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan bahwa fungsi penggerakan oleh kepala desa teluk ketapang banyak dikategorikan baik, karna tidak semua indikator variabel berada pada karegori baik. Yaitu dari 90 orang responden maka yang menyatakan baik adalah 54 orang responden atau 50 %, dan yang menyatakan tidak mendapat pengerakan adalah 7 orang responden atau 7,77 %, sedangkan yang menyatakan tidak tahu 29 orang responden atau 32,22 %, (tabel V.4 DAN tabel V.5 pada bab V).

Berdasarkan dari analisa yang dilakukan oleh penulis terlihat bahwa masih terdapat beberapa indikator yang tidak terlaksana dengan baik oleh kepala desa dalam melakukan penggerakan, maka sesuai dengan teknik pengukuran maka dapat dikatakan bahwa penggerakan kepala desa dapat dikaregorikan baik karena berada pada interval 34 %-70 %.

2. pemerintahan desa teluk ketapang telah melakukan pembinaan dalam meningkatkan sumber daya masyarakat agar lebih berperan aktif dalam meningkatkan pembangunan desa, tapi ternyata masih ada masyarakat yang merasa belum mendapat pembinaan, namun disini penulis menyimpulkan bahwa pembinaan yang dilakukan oleh kepala desa dikategorikan baik yaitu sekitar 76,66 %. (tabel V.12 dan tabel V.13 pada bab V).
3. Dari sisi petunjuk oleh kepala desa telah diberikan kepada masyarakat termasuk RT/RW, tapi ternyata masih ada masyarakat yang merasa belum dibawa atau diberi pengarahan. Maka disini penulis merumuskan berdasarkan persentase hasil penelitian yaitu pembinaan yang dilakukan oleh pemerintahan desa sudah cukup baik. Yaitu sekitar 71,11 %. (tabel V.19 dan tabel V.20 pada bab V)
4. Bahwa pertemuan telah dilakukan oleh kepala desa kepada masyarakat termasuk RT/RW, tetapi ternyata masih ada masyarakat yang belum mengikuti pertemuan, sehingga pertemuan yang dilakukan oleh kepala desa kurang maksimal jalanya, akan tetapi usaha kepala desa dalam melakukan pertemuan sudah cukup baik. 60 %. (tabel V.21 dan tabel V.22 pada bab V)
5. Dari sisi bimbingan oleh kepala desa telah dilakukan kepada masyarakat termasuk RT/RW, tapi ternyata masih ada masyarakat yang merasa belum mendapat bimbingan atau diberi pengarahan. Maka disini penulis

merumuskan berdasarkan persentase hasil penelitian yaitu pembinaan yang dilakukan oleh pemerintahan desa sudah cukup baik . yaitu 60 % . (tabel V.27 dan tabel V.28 pada bab V)

VI.2. Saran

Setelah meneliti dilapangan dan melihat kesimpulan diatas, ada hal-hal yang kiranya perlu untuk penulis sampaikan kepada Pemerintah Desa sebagai pertimbangan untuk kemajuan pemerintahan desa kedepan :

1. Sebaiknya dalam fungsi penggerakan itu harus berdasarkan pada informasi yang diperoleh dari masyarakat, agar masyarakat tidak kaku menerima kebijakan yang dibuat
2. Guna menjalankan kebijakan tersebut sebaiknya dilakukan pengawasan oleh suatu lembaga yang dibentuk bersama antara aparat desa dengan masyarakat.
3. Sebaiknya pelaksanaan pembangunan itu harus sesuai dengan kebijakan yang ada sehingga perencanaan yang telah di buat dapat dijalankan dengan baik.

Penulis mengakui masih banyak kekurangan akan tetapi apa yang penulis paparkan adalah hasil dari sebuah penelitian yang kiranya dapat bermanfaat.

Daftar Pustaka

- Alwis, *Pelayanan Prima birokrasi*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2002
- Anwar Khairul, Muhammad Ras Muis, *Perlemen Desa Membangun Demokrasi Dari Bawah*. Unri Pers, 2003
- Heri Zulfan dkk, *Parlemen Desa; Membangun Demokrasi Dari Bawah*, UNRI, 2003
- Labowo Muhadam, *Memahami Ilmu Pemerintahan Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya*, PT Rajawali Pers. Jakarta, 2006
- Thoha Miftah, *Kepemimpinan dan manajemen*, Rajawali Pers, Jakarta. 2005
- Riva'i Veithzal, *Kepemimpinan*, Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Singaribun Masri, Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta, 2006.
- Soekanto Soejono, *sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*, PT Rajawali Grafindo Persada. Jakarta, 2005
- Sondang P, *Administrasi Pembangunan*. Jakarta, Bina Aksara. 2005
- Sugiyono, *Metode Penelitian Desa*, PT. Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Sudriamunawar, Haryono, *Pembangunan Desa*. Jakarta : Bumi Aksara, 2002.
- Wasistomo Sadu, *Prospek Pengembangan Desa*, Fokus Media 2006.
- Widjaja. HAW, *Pemerintahan Desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Desa*, Rajawali Grafindo Persada. Jakarta, 2003.
- Wibowo, Edi.. *Reformasi Birokrasi Guna Mewujudkan Good Governance*. Jakarta, PT. Gramedia Utama, 2004.

Yusran Andi, *Desa Dalam Bingkai Pembangunan*, Pekanbaru, Suska Press, 2007.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Peraturan Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 Tentang Peraturan Desa.

TAP MPR No XV/MPR 1999 Tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah.

Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 1999, Fokus Media 2004.

Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 32 Tahun 2004, Fokus Media 2004.

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 : Populasi dan Sampel	37
Tabel IV.1 : Klasifikasi Penduduk Desa Rambah Jaya Menurut Suku	41
Tabel IV.2 : Klasifikasi Penduduk Desa Rambah Jaya Menurut Jenis Kelamin.....	42
Tabel IV.3 : Klasifikasi Penduduk Desa Rambah Jaya Menurut Umur	42
Tabel IV.4 : Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Rambah Jaya	43
Tabel IV.5 : Fasilitas Pendidikan Formal di Desa Rambah Jaya	44
Tabel IV.6 : Mata Pencaharian Penduduk Desa Rambah Jaya	45
Tabel IV.7 : Agama Penduduk Desa Rambah Jaya	46
Tabel IV.8 : Rumah Ibadah di Desa Rambah Jaya	46
Tabel V.1 : Distribusi Jawaban Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	50
Tabel V.2 : Distribusi Jawaban Responden Berdasarkan Umur	51
Tabel V.3 : Distribusi Jawaban Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	52
Tabel V.4 : Distribusi Jawaban Responden Mengenai Anggota BPD Mengerti Tugas, Kewajiban Dan Wewenang Desa	53
Tabel V.5 : Distribusi Jawaban Responden Tentang sudah terlaksana atau tidak fungsinya	54

Tabel V.6 : Distribusi Jawaban Responden mampu tidak BPD melakukan fungsinya	55
Tabel V.7 : Distribusi Jawaban Responden butuk atau tidaknya kantor secretariat	55
Tabel V.8 : Distribusi Jawaban Responden Tentang apakak cukup tersedianya sarana dan prasarana pendukung fungsinya	56
Tabel V.9 : Distribusi Jawaban Responden Tentang apakah pengaruh sarana dan prasarana pendukung bagi pelaksanaan fungsinya	57
Tabel V.10 : Distribusi Jawaban Responden Tentang pernah tidaknya BPD merumuskan peraturan Desa	58
Tabel V.11 : Distribusi Jawaban Responden Tentang pemerintahan desa meminta pertimbangan (pendapat)	59
Tabel V.12 : Distribusi Jawaban Respoden Tentang sesuai atau tidaknya peraturan desa	60
Tabel V.13 : Distribusi Jawaban Responden Mengenai butuh tidaknya anggaran dalam menjalankan fungsinya	61
Tabel V.14 : Distribusi Jawaban Responden tentang cukup atau tidaknya anggaran dalam menjalankan fungsinya	61
Tabel V.15 : Disteribusi Jawaban Responden Tentang sudah mendukung atau belum anggaran yang ada untuk pelaksanaan fungsinya.....	62
Tabel V.16 : Distribusi Jawaban Responden Tentang mengerti tidaknya akan fungsinya pemerintahan desa	63

Tabel V.17 : Distribusi Jawaban Responden Tentang pernah melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintahan Desa	65
Tabel V.18 : Distribusi Jawaban Responden Tentang terlaksana atau tidak fungsi kinerja pemerintahan desa	66
Tabel V.19 : Distribusi Jawaban Responden Tentang pemerintah desa meminta pertimbangan kepada BPD	66
Tabel V.20 : Distribusi Jawaban Responden Tentang pemrintah Desa mengundang BPD dalam setiap musyawarah	67
Tabel V.21 : Distribusi Jawaban Responden Tentang pemerintah Desa melibatkan BPD dalam membahas APBDes	68
Tabel V.22 : Distribusi Jawaban Responden Tentang BPD mengawasi anggaran APBDes	68
Tabel V.23 : Distribusi Jawaban Responden Tentang pemerintah mempertanggung jawabkan kepada BPD	69
Tabel V.24 : Distribusi Jawaban Responden Tentang kebutuhan akan peraturan Desa	70
Tabel V.25 : Distribusi Jawaban Responden Tentang BPD membuat kegiatan yang menumbuh kembangkan kreativitas masyarakat desa Rambah Jaya	71
Tabel V.26 : Distribusi Jawaban Responden Tentang BPD menampung aspirasi masyarakat desa Rambah Jaya	71

Tabel V.27 : Distribusi Jawaban Responden Tentang BPD menyalurkan aspirasi masyarakat Desa Rambah Jaya	73
Tabel V.28 : Distribusi Jawaban Responden Tentang BPD mengajak masyarakat Desa Rambah Jaya dalam penyelesaian masalah	73
Tabel V.29 : Distribusi Jawaban Responden Tentang masyarakat memberikan saran kepada BPD	74
Tabel V.30 : Distribusi Jawaban Responden Tentang masyarakat mengevaluasi kinerja BPD desa Rambah Jaya	75

KUESIONER PENELITIAN

JUDUL PENELITIAN :

**ANALISIS FUNGSI KEPALA DESA DALAM MENINGKATKAN
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN**

**(*STUDI KASUS PEMBANGUNAN FISIK DESA TELUK KETAPANG
KECAMATAN MERBAU KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI*)**

KETERANGAN :

1. Kuesioner ini disebarkan hanya untuk melengkapi Skripsi yang sedang saya kerjakan dan ini hanya merupakan Karya Ilmiah.
2. Jawaban yang Bapak/Ibu/Saudara/I berikan tidak ada pengaruhnya terhadap Pekerjaan Bapak/Ibu/Saudara/I.
3. Pilihlah salah satu jawaban yang paling mencerminkan hati nurani Bapak/Ibu/Saudara/I dengan memberikan tanda silang (X) pada salah satu jawaban
4. Atas partisipasi dan kerjasama yang Bapak/Ibu/Saudara/I berikan saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga, semoga Bapak/Ibu/Saudara/I selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin.....

IDENTITAS PENELITI

Nama : M. Rais
Nim : 10576002242
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : IX (Sembilan)
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial

Universitas : UIN Suska Riau

IDENTITAS RESPONDEN

Nama :.....

Jenis Kelamin :.....

Umur :.....

Pendidikan Terakhir :.....

Pekerjaan :.....

PERTANYAAN

a. Penggerakan oleh Kepala Desa

1. Apakah ada penggerakan yang jelas berupa Instruksi dari Kepala Desa
 - a. Ada
 - b. Tidak Ada
 - c. Tidak Tahu
2. apakah kepala desa berperan aktif menggerakan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan.
 - a. Ya
 - b. Tidak
 - c. Kadang-Kadang
 - d. Tidak Tahu
3. Apa dasar Perintah Penggerakan dibuat ?
 - a. Buku Pedoman Tata Usaha
 - b. Buku Harian Tata Usaha
 - c. Peraturan Daerah
 - d. Tidak tahu
4. Apakah ada hambatan dalam menjalankan penggerakan tersebut, jelaskan ?
 - a. Ada
 - b. Tidak
 - c. Tidak Tahu

b. Pembinaan kehidupan masyarakat

1. Apakah ada Pembinaan dari Kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan ?

- a. Ada b. Tidak Ada c. Tidak Tahu

2. Jika ada, apakah sudah baik pembinaan yang dilakukan oleh kepala desa ?

- a. Baik b. Kurang Baik c. Tidak Baik d. Tidak Tahu

3. Bagaimana tanggapan Bapak /Ibu/Saudara/I tentang Perekonomian Desa

- a. Baik b. Cukup Baik c. Sangat Baik d. Tidak Baik

4. Dari sisi apa saja sumber pendapatan Desa tersebut jelaskan :

5. Apa ada hambatan dalam menerima pembinaan dari Kepala Desa ini jelaskan :

- a. Ada b.Tidak Ada c. Tidak Tahu

C. Petunjuk-Petunjuk

1. Apakah Bapak/Ibu mendapat petunjuk dari kepala desa dalam melaksanakan kegiatan ?

- a. Ya b.Tidak c. kadang-kadang
d. Tidak Tahu

D. Pertemuan – Pertemuan

1. Apa ada pertemuan-pertemuan yang dilakukan Kepala Desa pada Masyarakat yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan ?

- a. Ada b. Tidak Ada c. Tidak Tahu
2. Kapan biasanya pertemuan-pertemuan sering dilakukan ?
- a. Setiap waktu b. Setiap ada kegiatan-kegiatan Desa
- c. tidak tahu
3. Apa ada hambatan- hambatan dari pertemuan-pertemuan ini ?
- a. ada b. tidak ada c. tidak tahu

E. Bimbingan oleh kepala desa

1. Apakah Kepala desa sudah berperan aktif dalam membimbing masyarakat untuk pembangunan desa
- a. Sudah b. Belum c. Tidak Tahu



BIOGRAFI PENULIS

M. Rais, dilahirkan di Desa teluk ketapang Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti pada tanggal 01 Januari 1986, dari pasangan Laili Saleh dan Darmawati, penulis adalah anak kedua dari tujuh bersaudara, empat Perempuan dan tiga Laki-Laki, masa kanak-kanak sampai Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) di habiskan didesa Teluk Ketapang, kemudian pada tahun 2001 penulis melanjutkan pendidikan di SMUN2 bukit Batu, Di SMU penulis di asuh oleh Nenek, dan penulis juga mulai hidup mandiri, selanjutnya pada tahun 2005 penulis melanjutkan kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis mendapatkan gelar sarjana lengkap pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan gelar Sarjana Sosial (S. Sos).

Selain itu penulis juga aktif di Organisasi baik Organisasi Internal maupun Organisasi Eksternal Kampus. Internal kampus penulis aktif di Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Islam Negeri sultan Syarif Kasim Riau, eksternal kampus penulis juga aktif sebagai pengurus Ikatan Pelajar Mahasiswa Kabupaten Bengkalis (IPMKB, kemudian penulis bergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), setelah penulis bergabung di GMNI penulis dipercaya untuk duduk di Dewan Pimpinan Cabang (DPC) sebagai Wakil Ketua Bidang Politik 2008-2010.